

FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI INDIA TAHUN 2019-2024

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

KHALIDA MARYAM

20323204

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI INDIA TAHUN 2019-2024

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

KHALIDA MARYAM

20323204

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Fenomena Islamophobia di India tahun 2019-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.

Tanda Tangan

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khalida Maryam
NIM : 10323204
Program Studi : Hubungan Internasional
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 27 November 2002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir yang akan tercantum pada Ijazah D3/S1/S2/S3/Profesi *) di Universitas Islam Indonesia disesuaikan dengan:

Ijazah SMA atau yang sederajat/Akta Kelahiran atau Surat Tanda Lahir *)

Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan pada pernyataan ini, saya bersedia untuk tidak menuntut Universitas Islam Indonesia guna mencetak ulang Ijazah dan Transkrip Akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Juni 2015

Yang menyatakan,

Materal 10.000
10000
METERAI TEMPEL
BDF08AMX232116485
perlu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Cakupan Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Kerangka Pemikiran	15
1.7 Argumen Sementara	19
1.8 Metode Penelitian	22
1.8.1 Jenis Penelitian	22
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	22
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	22
1.8.4 Proses Penelitian	23
1.9 Sistematika Pembahasan	23
BAB 2 ASPEK PENGECEUALIAN DAN KEKERASAN DALAM FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI INDIA	25
2.1 Aspek Pengecualian dalam Fenomena Islamophobia di India	25
2.1.1 Aspek Pengecualian Dalam Pekerjaan	25
2.2.2 Aspek Pengecualian dalam Pemerintahan dan Politik	29
2.2 Aspek Kekerasan dalam Fenomena Islamophobia di India	40
BAB 3 ASPEK PRASANGKA DAN DISKRIMINASI DALAM FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI INDIA	48
3.1 Aspek Prasangka dalam Fenomena Islamophobia di India	48
3.1.1 Prasangka Melalui Media	49
3.1.2 Prasangka Melalui Percakapan Sehari-Hari	57
3.2 Aspek Diskriminasi dalam Fenomena Islamophobia di India	61
3.2.1 Diskriminasi dalam Praktik Dunia Pekerjaan	62
3.2.2 Diskriminasi dalam Penyedia Layanan	66
BAB 4 PENUTUP	73
4.1 Kesimpulan	73
4.2 Rekomendasi	76
Daftar Pustaka	78

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena Islamophobia di India dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, dengan menyoroti berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, prasangka, dan pengecualian yang dialami komunitas Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengacu pada teori Islamophobia dari Runnymede Trust yang mencakup empat aspek utama: Exclusion, Violence, Prejudice, dan Discrimination. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber terpercaya, termasuk laporan organisasi internasional, media massa, serta publikasi akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak pengesahan Citizenship Amendment Act (CAA) pada 2019, terdapat peningkatan tajam dalam kasus ujaran kebencian, kekerasan sektarian, serta kebijakan pemerintah yang dinilai diskriminatif terhadap Muslim. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor politik dan ekonomi, tetapi juga memperburuk ketegangan sosial serta mempersempit ruang partisipasi Muslim dalam kehidupan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa Islamophobia di India bukan sekadar isu sosial, tetapi merupakan persoalan struktural yang terintegrasi dalam sistem politik dan kebijakan negara. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan masyarakat internasional dapat lebih waspada terhadap bahaya diskriminasi berbasis agama dan mendorong langkah-langkah konkret untuk menjamin keadilan sosial bagi semua golongan.

Kata kunci: Islamophobia, India, ekslusi, diskriminasi, kekerasan, prasangka

ABSTRACT

This study explores the phenomenon of Islamophobia in India during the period from 2019 to 2024, highlighting various forms of discrimination, violence, prejudice, and exclusion experienced by the Muslim community. Employing a descriptive qualitative approach, the research utilizes the Runnymede Trust theory of Islamophobia, which identifies four key aspects: exclusion, violence, prejudice, and discrimination. Data was collected through literature review from credible sources, including international organization reports, mass media, and academic publications. The findings indicate a sharp increase in hate speech, sectarian violence, and government policies perceived as discriminatory towards Muslims, particularly following the enactment of the Citizenship Amendment Act (CAA) in 2019. This phenomenon affects not only political and economic sectors but also exacerbates social tensions and narrows Muslim participation in public life. The study concludes that Islamophobia in India is not merely a social issue but a structural problem embedded within political and institutional frameworks. Understanding this dynamic is essential for the international community to recognize the dangers of religious-based discrimination and to support concrete actions that uphold social justice for all. Keywords: Islamophobia, India, discrimination, sectarian violence, CAA, Muslims

Keywords: Islamophobia, India, exclusion, discrimination, violence, prejudice

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah Islamophobia bukanlah istilah yang baru saja diketahui oleh masyarakat. Namun Islamophobia menjadi hal yang tidak asing lagi untuk diketahui oleh kalangan masyarakat khususnya daerah-daerah yang memiliki jumlah masyarakat mayoritas muslim. Apabila islamophobia tidak dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah maka dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi seluruh masyarakat baik masyarakat yang notabene nya muslim maupun masyarakat yang berasal dari non-Muslim (Aziz 2016).

Fenomena Islamophobia tumbuh subur di kawasan Asia Selatan yang bertetangga langsung dengan India yang secara historis merupakan rumah bagi populasi Muslim dalam jumlah besar. Di negara-negara seperti Pakistan dan Bangladesh yang mayoritas penduduknya beragama Islam, intoleransi agama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih menjadi persoalan serius. Di Pakistan, pasal-pasal penodaan agama dalam *Pakistan Penal Code*, khususnya Pasal 295-298, sering disalahgunakan untuk mengkriminalisasi komunitas Ahmadiyah, Kristen, Hindu, dan Syiah, bahkan dalam kasus-kasus yang tidak didukung oleh bukti kuat. Tuduhan seperti ini seringkali berujung pada kekerasan massa, hukuman berat, hingga pembunuhan di luar hukum. Sementara itu, di Bangladesh, komunitas Hindu kerap menjadi korban serangan berupa pembakaran rumah, penghancuran tempat ibadah, dan gangguan terhadap perayaan keagamaan. Di tengah ketegangan tersebut, pengungsi Rohingya yang tinggal di tempat-tempat penampungan juga menghadapi represi, termasuk

pemerasan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat (“United States Commission” 2023).

Situasi ini menunjukkan bahwa Islamophobia dan bentuk intoleransi agama lainnya tidak hanya terjadi di negara dengan mayoritas non-Muslim, tetapi juga bisa muncul sebagai bentuk represi terhadap kelompok minoritas di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Di India, fenomena Islamophobia tampak mengalami eskalasi yang lebih sistematis. Meski secara konstitusi India adalah negara sekuler, realitas sosial menunjukkan bahwa komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas terbesar sering menjadi target kebijakan eksklusif dan kekerasan berbasis agama (“United States Commission” 2023).

India dikenal sebagai negara dengan keragaman agama yang tinggi. Namun sayangnya, hubungan antarumat beragama di India kerap diliputi ketegangan. Hal ini dikarenakan jika dilihat secara historis, konflik antara komunitas Hindu dan Muslim sudah berlangsung sejak masa penjajahan dan semakin rumit setelah kemerdekaan pada tahun 1947. Salah satu faktor pemicunya adalah peristiwa pembagian wilayah antara India dan Pakistan yang menyebabkan gelombang kekerasan berbasis agama dan memperkuat garis pemisah antara identitas politik dan keagamaan. Dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak Partai Bharatiya Janata (BJP) memegang kekuasaan, nasionalisme Hindu semakin menguat. BJP sendiri memiliki keterkaitan ideologis dengan gerakan Hindutva, yang menekankan bahwa identitas Hindu merupakan dasar negara India. Perkembangan politik ini berdampak pada semakin terpinggirkannya kelompok Muslim serta meningkatnya perpecahan sosial di tengah masyarakat (Shaikh, Iqbal, Fazal, and Khan 2023).

India juga merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dengan lebih dari 200 juta Muslim, India menempati posisi ketiga sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak setelah Indonesia dan Pakistan. Berdasarkan studi Pew Research Center tahun 2015, sekitar 94% populasi Hindu dunia tinggal di India, yang bersama dengan Nepal merupakan dua negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Selain itu, India juga menjadi rumah bagi salah satu komunitas Muslim terbesar secara global, hanya berada di belakang Indonesia yang pada tahun 2010 memiliki sekitar 209 juta (20,9 crore) Muslim. Jumlah umat Muslim di Pakistan diperkirakan sebanding dengan yang ada di India, sementara Bangladesh menempati posisi keempat dengan sekitar 134 juta (13,4 crore) Muslim. Perlu dicatat bahwa Bangladesh sebelumnya merupakan bagian dari Pakistan sebelum memisahkan diri pada 1970-an. Meskipun Pakistan dan Bangladesh merupakan negara dengan mayoritas Muslim, total populasi keduanya secara keseluruhan masih lebih kecil dibandingkan dengan India (Pew Research Center 2021).

Sebagai salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, India menghadapi tantangan sosial yang kompleks dengan berbagai kasus yang muncul akibat sentimen kebencian terhadap Islam. Sejarah panjang Muslim di India telah menjadikan mereka bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi negara ini. Dari era Kesultanan Delhi hingga kejayaan Kekaisaran Mughal, kontribusi Muslim dalam bidang seni, arsitektur, sastra, hingga perdagangan sangat signifikan. Namun, di balik peran penting ini, komunitas Muslim di India menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam

bentuk diskriminasi sosial, ekonomi, dan politik yang kian hari semakin nyata. Salah satu faktor utama yang memperburuk situasi ini adalah meningkatnya Islamophobia, yang merasuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat India. Sejak kemerdekaan India, hubungan antara komunitas Hindu dan Muslim kerap mengalami ketegangan. Partisi India-Pakistan yang menyebabkan perpecahan besar serta gelombang kekerasan antar kelompok agama telah meninggalkan luka mendalam (Jaffrelot 2021).

Ketegangan ini terus berlanjut, terutama dengan semakin menguatnya nasionalisme Hindu yang dipelopori oleh Partai Bharatiya Janata (BJP). Dalam beberapa tahun terakhir, umat Muslim di India kerap menjadi target kebijakan diskriminatif, ujaran kebencian, serta kekerasan berbasis agama yang semakin meluas melalui berbagai platform media sosial (India Hate Lab 2024). Meskipun konstitusi India menjunjung tinggi sekularisme dan kebebasan beragama, realitas di lapangan seringkali menunjukkan sebaliknya, dimana Muslim menghadapi berbagai bentuk perlakuan diskriminatif, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena Islamophobia di India semakin memburuk sejak kemenangan BJP dalam pemilu 2019 dibawah kepemimpinan Narendra Modi. Terdapat kebijakan yang diusung, seperti Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act) atau yang disebut sebagai CAA pada tahun 2019 yang menimbulkan kecaman luas karena dianggap merugikan umat muslim. CAA memberikan jalur cepat kewarganegaraan bagi minoritas agama dari negara-negara tetangga seperti Hindu, Sikh, Budha, Kristen, tetapi mengecualikan muslim.

Pernyataan tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 2 dan pasal 6B Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) tahun 2019. Pasal 2 Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) menyatakan bahwa individu yang berasal dari komunitas agama minoritas tertentu, yakni Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen yang mengalami persekusi di negara-negara seperti Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan serta telah memasuki wilayah India sebelum 31 Desember 2014, tidak akan dikategorikan sebagai imigran ilegal untuk kepentingan pemberlakuan undang-undang tersebut. Adapun Pasal 6B Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) 2019 mengatur bahwa individu-individu yang termasuk dalam kategori komunitas agama minoritas sebagaimana disebutkan dalam ketentuan sebelumnya yaitu Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India melalui mekanisme naturalisasi. Proses tersebut hanya dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang pada akhirnya memungkinkan mereka memperoleh status kewarganegaraan secara sah (Legislative Department 2019).

Merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) tahun 2019 terlihat bahwa kebijakan tersebut secara eksplisit mengecualikan umat Muslim dari kelompok yang memperoleh kemudahan dalam proses naturalisasi kewarganegaraan. Pengecualian ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberadaan dan status hukum komunitas Muslim di India, terutama dalam konteks implementasi sistem kewarganegaraan yang selektif. Kebijakan tersebut secara implisit

menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok non-Muslim, yang sebagian besar merupakan bagian dari komunitas mayoritas atau minoritas non-Muslim tertentu. Akibatnya, CAA dinilai tidak memberikan perlindungan hukum maupun keuntungan yang setara bagi warga Muslim India, serta memperkuat narasi bahwa negara hanya mengakomodasi kepentingan kelompok agama tertentu, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan sekularisme yang dijamin dalam Konstitusi India (Alaa, Sariburaja, and Tajari 2022).

Dengan adanya ketentuan dari CAA tersebut, maka muncul perdebatan dari beberapa pihak khususnya dari imigran yang berada di wilayah India. Perdebatan yang bersifat memecah belah mengenai siapa yang dianggap sebagai penduduk sah di Assam, sebuah negara bagian yang kaya akan keberagaman etnis di wilayah timur laut India dan berbatasan langsung dengan Bangladesh sepanjang 163 mil, telah berlangsung selama lebih dari satu abad. Ketegangan ini bermula sejak kedatangan gelombang awal migran Bengali yang bekerja di perkebunan teh milik kolonial Inggris. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang signifikan, muncul gerakan penolakan dari warga lokal Assam terhadap keberadaan migran penutur bahasa Bengali yang dianggap mengancam identitas budaya dan struktur demografis mereka (Bagri 2021).

Puncak dari ketegangan ini terjadi pada tahun 1985 melalui penandatanganan Perjanjian Assam, yang menetapkan bahwa setiap individu yang memasuki wilayah Assam setelah tanggal 24 Maret 1971, yakni satu hari sebelum Bangladesh mendeklarasikan kemerdekaannya, dianggap sebagai imigran ilegal dan harus dideportasi. Sejak saat itu, pemerintah negara bagian Assam bersama

dengan pemerintah pusat India telah memberlakukan berbagai kebijakan yang kompleks dan saling tumpang tindih untuk membedakan antara penduduk yang berhak atas kewarganegaraan dan mereka yang dianggap tidak sah secara hukum (Bagri 2021).

Tak hanya dalam kebijakan pemerintah, sejumlah pemerintah daerah juga menerapkan aturan yang membatasi konversi agama seperti halnya melarang pernikahan antar agama, serta membiarkan ujaran kebencian menyebar luas di media sosial. Keadaan semacam ini mencerminkan berkembangnya Islamophobia yang semakin terstruktur dan dilembagakan di India (“United States Commission” 2023).

Tidak terbatas dari segi pemerintahan dan politik saja, namun bentuk kekerasan terhadap Muslim juga telah terjadi. Salah satu kasus Islamophobia yang terjadi di India meliputi adanya penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dan Ummu Aisyah oleh Jubir BJP Nupur Sharma pada tanggal 27 Mei 2022 dalam sebuah acara debat di stasiun televisi India hingga pelarangan penggunaan hijab bagi perempuan Muslim di Universitas Karnataka. Karena kasus itulah India menjadi salah satu negara dari berbagai belahan penjuru yang memiliki kasus Islamophobia tertinggi di dunia (Republika 2022). Selain itu insiden besar yang terjadi pada Februari 2020 di Delhi, yang dipicu oleh protes terhadap CAA, berujung pada serangan brutal terhadap komunitas Muslim. Puluhan orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dan berbagai properti yang dimiliki umat Muslim dihancurkan (Bajoria 2020).

Sementara itu, retorika politik yang menyebut Muslim sebagai ancaman terhadap identitas Hindu India semakin memperburuk situasi, yang ditandai dengan ujaran kebencian yang terus menyebar melalui berbagai media sosial. Seperti halnya dalam pidato kampanyenya di negara bagian Rajasthan pada 19 April 2024, Perdana Menteri India, Narendra Modi, kembali menyinggung kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Kongres Nasional India (INC). Ia menuduh bahwa ketika INC berkuasa, mereka memprioritaskan umat Muslim dalam pembagian sumber daya negara. “Ketika Kongres Nasional India (INC) berkuasa, mereka akan mengatakan kalau umat Islam mempunyai hak pertama atas sumber daya,” ujar Modi dalam pidatonya. Pernyataan ini mempertegas retorika politiknya yang menggambarkan kebijakan INC sebagai kebijakan yang tidak adil terhadap mayoritas penduduk India (CNN Indonesia 2024).

Lebih lanjut, Modi memperingatkan para pendukungnya bahwa kekayaan mereka akan dikumpulkan dan disalurkan kepada kelompok tertentu, termasuk mereka yang memiliki lebih banyak anak dan yang ia sebut sebagai "penyusup." Ia dengan tegas bertanya, “Apakah Anda rela uang hasil jerih payah Anda diberikan ke penyusup?” Pernyataan ini secara implisit menargetkan komunitas Muslim, yang sering kali digambarkan dalam wacana politiknya sebagai kelompok yang mengancam stabilitas ekonomi dan sosial India. Dengan menggunakan istilah “penyusup” Modi memperkuat narasi yang telah lama digunakan oleh partainya untuk membangun sentimen nasionalisme Hindu dan membingkai Muslim terutama imigran dari negara tetangga sebagai ancaman bagi kepentingan nasional (CNN Indonesia 2024).

Dampak Islamophobia juga terasa dalam aspek sosial dan ekonomi. Muslim di India menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, pendidikan, dan akses layanan publik. Mereka kerap menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor formal akibat stereotip negatif (Republika 2022). Selain itu, kebijakan pendidikan yang diskriminatif, seperti larangan jilbab di beberapa negara bagian seperti Karnataka yang menilai hijab bukanlah sebuah prinsip utama Islam yang wajib digunakan bagi perempuan muslim di India, semakin menegaskan bahwa kebebasan beragama bagi Muslim di India semakin dipersempit (Maqbool 2022).

Pada tahun 2023, fenomena Islamophobia di India mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam bentuk ujaran kebencian terhadap komunitas Muslim. India Hate Lab (IHL) mencatat sebanyak 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan umat Muslim sepanjang tahun tersebut. Secara khusus, terdapat lonjakan insiden dari 255 kasus pada paruh pertama tahun 2023 menjadi 413 kasus pada paruh kedua, menandai peningkatan sebesar 62%. Tren ini mencerminkan semakin maraknya retorika anti-Muslim dalam ruang publik, yang diperburuk oleh kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif terhadap minoritas. Dalam banyak kasus, ujaran kebencian ini tidak hanya terbatas pada ekspresi verbal, tetapi juga berujung pada tindakan kekerasan dan marginalisasi sosial terhadap komunitas Muslim di berbagai wilayah India (India Hate Lab 2024).

Memasuki tahun 2024, situasi Islamophobia di India semakin memburuk dengan eskalasi yang lebih luas dan sistematis. Jumlah insiden ujaran kebencian melonjak drastis dari 668 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 1.165 kasus,

menandai peningkatan sebesar 74,4%. Lonjakan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik domestik, terutama ambisi ideologis Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa serta pengaruh gerakan nasionalis Hindu yang semakin menguat. Ujaran kebencian yang muncul pada tahun 2024 semakin terang-terangan menyerang komunitas Muslim, baik melalui seruan untuk kekerasan, ancaman terhadap tempat ibadah, maupun seruan boikot ekonomi terhadap kelompok minoritas (India Hate Lab 2025).

Kenaikan tajam dalam jumlah insiden ujaran kebencian ini menunjukkan bahwa Islamophobia di India bukan hanya sekedar fenomena sosial, tetapi juga memiliki dimensi politik yang lebih dalam. Retorika kebencian yang semakin intensif menunjukkan bahwa minoritas Muslim di India menghadapi ancaman yang semakin nyata, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi yang efektif, ketegangan sosial di India dapat semakin meningkat, mengancam stabilitas nasional serta prinsip pluralisme yang selama ini menjadi bagian dari identitas negara tersebut.

Fokus penelitian ini akan menggambarkan mengenai fenomena islamophobia dari berbagai aspek yang meliputi diskriminasi sosial, kekerasan berbasis agama, ujaran kebencian di media sosial, dan dampak ekonomi terhadap Muslim di India pada tahun 2019 sejak CAA disahkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika Islamophobia di India serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan politik di negara tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah aspek Islamophobia di India yang muncul pada tahun 2019-2024 menurut teori empat aspek dari Runnymede Trust?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dibentuk oleh penulis adalah untuk mengetahui fenomena Islamophobia di India pada tahun 2019-2024.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada fenomena Islamophobia di India dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Rentang waktu yang digunakan dimulai dari tahun 2019, yaitu saat kebijakan CAA mulai diberlakukan. Kajian penelitian ini mengulas perkembangan Islamophobia hingga tahun 2024, karena pada tahun tersebut fenomena ini masih berlangsung dan bahkan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam beberapa jurnal penelitian yang ditemukan oleh penulis terdapat banyak penjelasan mengenai Islamophobia pada saat diberlakukannya CAA (Citizenship Amendment Act). Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan 2019 (CAA) di India menjadi contoh nyata pelembagaan Islamophobia dalam kebijakan negara.

Pengesahan Citizenship Amendment Act (CAA) pada tahun 2019 oleh Pemerintah India dilatarbelakangi oleh upaya untuk menanggulangi permasalahan imigrasi ilegal yang dianggap turut berkontribusi terhadap lonjakan jumlah penduduk serta munculnya berbagai persoalan sosial. Diantara

persoalan sosialnya ialah meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas. Kebijakan ini dirancang sebagai instrumen legal untuk mempercepat pemberian status kewarganegaraan bagi kelompok imigran tertentu. Namun demikian, perumusan CAA dinilai mengabaikan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial, sebab hanya memberikan hak kewarganegaraan kepada imigran non-Muslim dari Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan yang telah menetap di India sebelum tahun 2014 dan mengalami persekusi di negara asal mereka. Pengecualian terhadap kelompok Muslim dalam ketentuan tersebut memicu kontroversi dan ketegangan sosial, karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi sistemik yang bertentangan dengan prinsip sekularisme yang dijamin dalam Konstitusi India (Lestari, Zahidi, and Afiya 2023).

Undang-undang ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim India, karena mereka diwajibkan untuk menunjukkan bukti legal terkait status kewarganegaraan mereka. Apabila tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, terdapat kemungkinan bahwa mereka akan kehilangan status kewarganegaraan secara sepihak. Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 juga diduga dimanfaatkan sebagai alat politik oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), partai berhaluan nasionalis Hindu yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi dengan tujuan memperkuat polarisasi sosial dan agama di India. Oleh karena itu, pemerintah dinilai gagal mengambil langkah konkret untuk menghentikan ketegangan yang timbul akibat kebijakan ini. Modi hanya menyerukan perdamaian kepada masyarakat tanpa disertai kebijakan nyata yang solutif, padahal sebelumnya dalam kampanye politiknya, ia sempat menyatakan komitmen untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa

diskriminasi (Kumar 2020).

Selama beberapa dekade, komunitas Muslim di India telah menjadi salah satu kelompok agama yang paling terabaikan. Hal ini ditandai dengan keterlibatan yang minim dalam ranah politik, sistem pendidikan, dan sektor ekonomi negara. Kondisi keterpinggiran ini semakin diperburuk oleh disahkannya Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) tahun 2019, yang secara eksplisit mengecualikan mereka dari hak untuk memperoleh suaka sebagai korban penganiayaan berbasis agama. Sementara itu catatan sejarah menunjukkan bahwa konflik antara umat Hindu dan Muslim di India telah memunculkan sentimen anti-Muslim jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang CAA tahun 2019. Namun, kehadiran undang-undang tersebut justru memperdalam ketegangan yang telah lama ada yang ditandai dengan memicu gelombang kekerasan baru di berbagai wilayah, serta semakin memperkuat dan memperluas sentimen anti-Muslim di India.(Alaa, Sariburaja, and Tajari 2022).

Jika menilik berbagai peristiwa historis yang berkaitan dengan sentimen anti-Muslim, tampak jelas bahwa ketegangan antar agama tersebut bukanlah fenomena baru di India. Pada tahun 1992, sekitar 150.000 pendukung BJP, RSS, dan Shiv Sena terlibat dalam perobohan masjid yang kemudian memicu gelombang kekerasan massal di seluruh India. Aparat kepolisian memilih untuk tidak turun tangan, sehingga konflik tersebut menyebabkan lebih dari 1.700 korban jiwa, hampir 1.000 orang luka-luka, serta terjadi pemerkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan yang sebagian besar dari mereka merupakan

umat Muslim. Peristiwa ini sejatinya dapat dicegah sepenuhnya apabila aparat penegak hukum bertindak sesuai tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban. Tragedi ini menjadi contoh nyata dari sentimen anti-Muslim yang mengakar, karena bukan semata-mata pertikaian antara dua kelompok agama, melainkan melibatkan kelalaian dari pihak berwenang yang seharusnya melindungi seluruh warga negara. Ketika ribuan nasionalis Hindu menghancurkan tempat ibadah, negara dan aparat memilih bungkam dan tidak bertindak apapun (Narula 2003).

Perlu ditekankan bahwa sentimen anti-Muslim tetap berlanjut, salah satunya terlihat dari tuduhan bahwa umat Muslim sengaja menyebarkan virus corona dan dituding melakukan apa yang disebut sebagai "jihad corona" (Ramachandran 2020). Meskipun demikian, intensitas kekerasan mengalami penurunan seiring diterapkannya pembatasan mobilitas yang lebih ketat sejak tahun 2020 guna menanggulangi pandemi COVID-19. Poddar (2018) mengemukakan bahwa keberpihakan terhadap kelompok agama tertentu serta pengecualian terhadap Muslim mencerminkan adanya agenda sektarian dan menimbulkan pertanyaan serius terhadap komitmen negara dalam menegakkan prinsip-prinsip sekularisme (Poddar 2018).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) tahun 2019 telah memicu munculnya sentimen anti-Muslim di India karena memarginalkan komunitas Muslim melalui ketentuan-ketentuan yang diskriminatif. Substansi dari undang-undang ini secara nyata mencerminkan sikap pengecualian terhadap Muslim, dengan tidak memberikan hak kewarganegaraan kepada mereka yang mengalami

penganiayaan. Berbeda halnya dengan umat Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang justru diakomodasi. Sementara itu dengan disahkannya CAA dapat memicu meningkatnya Islamophobia yang melembaga, memperkuat diskriminasi terhadap Muslim, dan memperdalam ketegangan antara sekularisme serta kebijakan imigrasi berbasis agama di India.

1.6 Kerangka Pemikiran

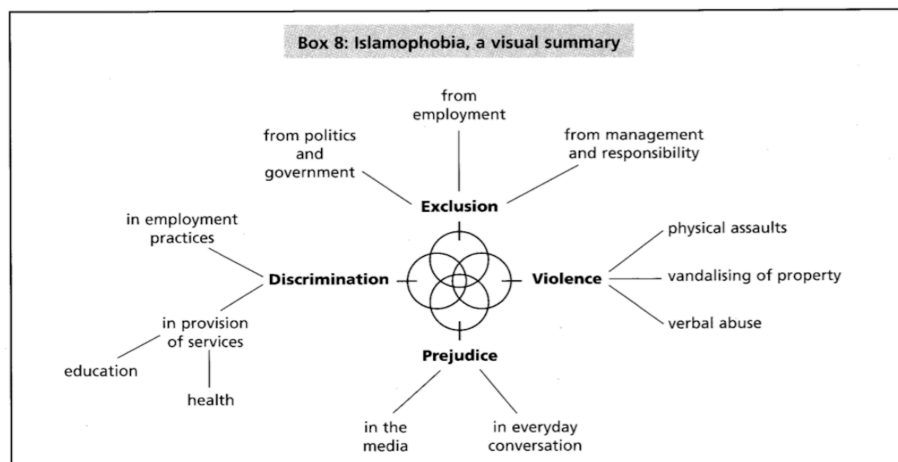
Istilah 'Islamophobia' muncul sebagai respons terhadap realitas baru, yaitu meningkatnya prasangka terhadap Muslim dalam beberapa tahun terakhir dengan cepat dan signifikan. Karena itu, diperlukan istilah khusus untuk mengenali dan mengatasi fenomena ini. Situasi serupa pernah terjadi dalam sejarah Eropa ketika istilah "anti semitisme" diciptakan untuk menyoroti meningkatnya ancaman terhadap komunitas Yahudi. Meskipun keberadaan istilah tersebut membantu mengidentifikasi bahaya yang berkembang, hal itu tidak dapat mencegah terjadinya tragedi di kemudian hari (The Runnymede Trust 1997).

Islamophobia merujuk pada sikap permusuhan yang tidak beralasan terhadap Islam. Selain itu, istilah ini juga mencakup dampak nyata dari sikap tersebut, seperti perlakuan diskriminatif terhadap individu dan komunitas Muslim serta pengucilan mereka dari partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial utama (The Runnymede Trust 1997).

Meskipun demikian, istilah ini bukan tanpa kritik. Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaannya terlalu condong pada kepatuhan terhadap

norma-norma politik tertentu, membatasi kebebasan dalam mengkritik Islam, serta memberikan label negatif siapapun yang ingin menyampaikan kritik terhadap agama tersebut.

Oleh karena itu dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan penjelasan atau aspek lain untuk mengartikan Islamophobia secara global dalam berbagai jenis kasusnya. Sehingga dalam melakukan penelitian tugas akhir ini penulis akan menggunakan teori empat aspek dalam Islamophobia yang dikemukakan oleh Runnymede Trust. Keempat aspek utama yang sering muncul dalam fenomena Islamophobia meliputi *Exclusion* (Pengecualian), *Violence* (Kekerasan), *Prejudice* (Prasangka), dan *Discrimination* (Diskriminasi) (The Runnymede Trust 1997).



Gambar 1. Aspek-aspek Islamophobia

Islamophobia pertama kali terlihat dalam aspek *Exclusion* (pengecualian), yaitu ketika orang atau kelompok Muslim tidak diberi kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini bukan hanya soal perlakuan tidak adil secara langsung, tapi juga menyangkut aturan atau kebijakan yang secara tidak

langsung membuat Muslim sulit ikut serta, misalnya dalam dunia politik, mencari pekerjaan, atau mengakses layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Menurut Nazhruna Journal yang ditulis oleh Nihaya Jaber pada tahun 2022, pengecualian ini bersifat sistemik, yakni sudah menjadi bagian dari sistem atau aturan yang berlaku, bukan hanya karena sikap pribadi seseorang. Misalnya, ada komunitas atau lembaga yang secara sengaja atau tidak sengaja membatasi ruang gerak Muslim karena identitas agamanya (Jaber 2022).

Sementara itu, menurut Runnymede Trust pada tahun 1997, menjelaskan bahwa Muslim sering kali dianggap sebagai pihak luar atau “yang berbeda” dari masyarakat umum. Pandangan ini membuat mereka sulit diterima secara utuh dalam kehidupan sosial dan budaya di tempat mereka tinggal. Akibatnya, mereka sering dikesampingkan dari percakapan penting, pembuatan kebijakan, atau bahkan dari media yang membentuk opini publik (The Runnymede Trust 1997).

Aspek kedua, yakni *violence* (kekerasan) mencakup serangkaian tindakan fisik dan simbolik yang menargetkan Muslim atau yang dianggap Muslim. Laporan dari Runnymede menegaskan bahwa kekerasan ini tidak hanya berupa serangan langsung, seperti pemukulan atau vandalisme tempat ibadah, tetapi juga serangan kecil sehari-hari yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Studi yang dilakukan oleh ciftci dalam Journal Muslim of Minority Affairs pada tahun 2022 juga mendukung pengklasifikasian ini sebagai salah satu elemen utama Islamophobia yang dimana tindak kekerasan sering melibatkan penyiksaan simbolis terhadap Muslim “yang terlihat” atau berwajah Islam (Riaz Abbasi 2022).

Aspek ketiga dari Islamophobia yang dibahas dalam penelitian ini adalah prasangka (*prejudice*). Prasangka terhadap Muslim sering muncul dari stereotip negatif yang berkembang di media massa, media sosial, maupun dalam percakapan sehari-hari. Representasi Islam yang kerap dikaitkan dengan kekerasan, ekstremisme, atau intoleransi menciptakan persepsi keliru yang tidak berbasis fakta. Hal ini kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memperlakukan umat Muslim, baik secara individu maupun kelompok, meskipun mereka tidak menunjukkan karakteristik seperti yang diasumsikan. Seperti yang ditegaskan oleh Runnymede Trust (1997), prasangka ini bukan hanya bersifat personal, tetapi juga membentuk narasi publik yang berujung pada marginalisasi sosial (The Runnymede Trust 1997).

Selanjutnya adalah aspek yang keempat yaitu *discrimination* (diskriminasi) yaitu perlakuan tidak adil yang diterima Muslim dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Diskriminasi ini bisa muncul secara terbuka maupun terselubung, dan seringkali diperkuat oleh institusi melalui kebijakan yang bias atau tidak sensitif terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, Islamophobia tidak hanya dipahami sebagai sikap permusuhan atau kebencian, tetapi juga sebagai sistem ketidaksetaraan yang mempengaruhi hak dan kesempatan Muslim di masyarakat (The Runnymede Trust 1997).

Dalam aspek pengecualian, Islamophobia sering kali menyebabkan marginalisasi Muslim dalam bidang politik, pemerintahan, dan pekerjaan, di mana mereka mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan posisi penting atau partisipasi dalam kebijakan publik. Dalam aspek kekerasan, umat Muslim di

beberapa negara kerap menjadi sasaran serangan fisik, perusakan masjid, atau pelecehan verbal yang merendahkan identitas keagamaan mereka. Prasangka terhadap Islam dan Muslim sering kali diperkuat oleh pemberitaan negatif di media yang menggambarkan Islam sebagai agama yang berkaitan dengan kekerasan atau ekstremisme, sehingga membentuk stereotip yang tidak berdasar. Sementara itu, dalam aspek diskriminasi, Muslim dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, perumahan, atau layanan publik karena identitas agama mereka.

Dengan memahami keempat aspek ini, kita dapat menyadari bahwa Islamophobia bukan hanya sekadar ketidaksukaan terhadap suatu kelompok, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan struktural yang menghambat hak-hak Muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran, membangun toleransi, dan mengedukasi masyarakat agar dapat menghilangkan prasangka serta memastikan keadilan bagi semua kelompok, tanpa memandang latar belakang agama atau identitas mereka.

Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menggunakan teori empat aspek dalam Islamophobia yang dikemukakan oleh Runnymede Trust untuk menjawab penelitian tugas akhir ini mengenai fenomena Islamophobia di India pada tahun 2019-2024.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori empat aspek Islamophobia dari Runnymede Trust, dapat disimpulkan sementara bahwa Islamophobia di India pada tahun 2019–2024 mengalami peningkatan yang

sistemik, terutama sejak diberlakukannya Citizenship Amendment Act (CAA). Komunitas Muslim menghadapi berbagai bentuk pengecualian, kekerasan, prasangka, dan diskriminasi yang saling berkaitan mulai dari hambatan politik dan ekonomi, serangan fisik dan verbal, hingga stigma negatif di media serta ketidaksetaraan dalam akses layanan publik.

Dalam bentuk Exclusion (pengecualian), terdapat beberapa kasus pengecualian yang menimpa masyarakat Muslim di India dalam lingkup pekerjaan dan lingkup pemerintahan dan politik. Dalam lingkup pekerjaan, sejak 2019–2020, terjadi ketimpangan signifikan dalam akses pekerjaan tetap antara Muslim dan non-Muslim di wilayah perkotaan. Hanya 15,6% Muslim usia 15 tahun ke atas yang memiliki pekerjaan tetap, jauh di bawah 23,3% non-Muslim. Ketimpangan ini mencerminkan hambatan struktural yang menghalangi Muslim memperoleh pekerjaan formal yang stabil. Sementara itu dalam lingkup pemerintahan dan politik, BJP sebagai partai yang berkuasa tidak memiliki satupun anggota parlemen yang berasal dari komunitas Muslim, hal ini memperkuat representasi pengecualian politik terhadap kelompok Muslim struktur kekuasaan nasional.

Kemudian dalam bentuk Violence (kekerasan), beberapa kasus kekerasan terjadi sejak disahkannya CAA pada tahun 2019 hingga tahun 2024. Seperti halnya pada Februari 2020 kerusuhan komunal di New Delhi yang menewaskan 53 orang, operasi pengusuran paksa terhadap rumah milik 1.300 keluarga mayoritas muslim yang dilakukan oleh pemerintah Assam di wilayah Darrang, aparat keamanan menghancurkan lebih dari 300 rumah dan toko milik warga Muslim di Distrik Nuh dengan menggunakan bulldoser. Kebijakan

penghancuran properti tersebut memicu tindakan kontroversi terkait penegakan hukum yang tidak adil bagi warga Muslim.

Sementara itu, pada aspek Prejudice (prasangka) dalam Islamophobia dapat muncul dalam berbagai bentuk, terutama melalui media dan interaksi sosial sehari-hari. Prasangka dalam bentuk media berupa ujaran kebencian menggunakan platform media sosial, salah satunya adalah twitter dengan tagar #Biojihad dan #Jihadcorona yang ditujukan kepada masyarakat Muslim pada saat pandemi Covid 19. Hal ini dikarenakan muslim dianggap sebagai *superspreaders* Covid-19 karena Muslim masih melakukan beberapa kegiatan di tempat ibadah yang diduga memicu perkembangan kasus pandemi pada saat itu. Kemudian prasangka dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa perlakuan yang merendahkan dari pelayanan pendidikan di sekolah maupun pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Adapun aspek yang terakhir yaitu *Discrimination* (diskriminasi) yang mencakup perlakuan tidak adil dalam lingkup pekerjaan dan penyedia layanan. Dalam lingkup pekerjaan, terdapat peningkatan pengangguran saat masa pandemi tahun 2019-2020 yang menyebabkan rendahnya lapangan pekerja bagi muslim di daerah perkotaan dari 59,3% hingga 68,3%. Kemudian pada tahun 2023-2024 angka pengangguran di kalangan kelompok minoritas di India mengalami kenaikan, pengangguran umat Muslim meningkat dari 2,4% menjadi 3,2% sementara pengangguran di kalangan umat Hindu menunjukkan sedikit penurunan, yakni sebesar 0,1 poin persentase. Kemudian ditinjau dari aspek diskriminasi dalam penyedia layanan, menurut Oxfam (2021) umat Muslim mengalami tingkat diskriminasi yang lebih tinggi dalam pelayanan kesehatan,

dengan 33% dari mereka menghadapi perlakuan diskriminatif di rumah sakit. Hal menunjukkan adanya perlakuan tidak adil di sektor kesehatan yang didasarkan pada identitas agama dan sosial.

Dari keempat aspek diatas, dapat dikatakan bahwa fenomena ini tidak hanya mencerminkan intoleransi sosial, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang terlembaga dalam kebijakan negara, sehingga memerlukan perhatian dan tanggapan serius dari berbagai pihak.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian tugas akhir ini yaitu metode penelitian kualitatif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini meliputi pemerintah India dan masyarakat. Sementara objek penelitiannya adalah fenomena Islamophobia di India pada tahun 2019-2024.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam melakukan penelitian untuk tugas akhir ini yaitu dengan cara menggunakan metode literatur yang ditemukan penulis dalam beberapa jurnal, media massa, maupun artikel. Adapun nantinya sumber-sumber literatur seperti jurnal, artikel maupun media massa akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum dianalisis lebih lanjut dan dikembangkan menjadi sebuah tulisan berlandaskan tinjauan teori yang digunakan. Tujuan pengumpulan sumber data penelitian tersebut

dimaksudkan untuk melatih dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian serta dapat memperkuat argumen-argumen sementara yang telah dikumpulkan dalam bentuk informasi lain oleh penulis.

1.8.4 Proses Penelitian

Sebagai upaya untuk melakukan proses penelitian pembuatan tugas akhir ini penulis memulai proses penelitian dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang ditemukan dalam jurnal, artikel, maupun media massa serta website yang aktual dan terpercaya. Sumber-sumber yang ditemukan kemudian dianalisis lebih lanjut oleh penulis. Dalam proses analisisnya, penulis juga mendalami materi serta memahami materi dengan membaca berulang kali sumber yang telah dikumpulkan. Kemudian setelah itu penulis mulai membentuk tulisan ilmiah yang berbentuk deskriptif oleh sebab jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk melanjutkan penulisan tugas akhir pada tahap pembahasan maka dibutuhkan sistematika pembahasan dengan uraian seperti dibawah ini;

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumentasi sementara, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB 2 PEMBAHASAN

Adapun bab dua berisi tentang pembahasan mengenai fenomena Islamophobia yang meliputi aspek pengecualian dan kekerasan yang

dikemukakan oleh Runnymede Trust.

BAB 3 PEMBAHASAN

Pada Bab 3 membahas mengenai aspek prasangka dan diskriminasi dalam fenomena Islamophobia di India yang dikemukakan oleh Runnymede Trust.

BAB 4 PENUTUP

Untuk menutup penulisan ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang terbentuk dari fenomena Islamophobia di India tahun 2019-2024 sejak diberlakukannya CAA dan juga terdapat rekomendasi untuk penelitian berikutnya.

BAB 2

ASPEK PENGECCUALIAN DAN KEKERASAN DALAM FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI INDIA

Dalam memahami fenomena Islamophobia di India, pada bab ini penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai Islamophobia melalui kerangka pemikiran yang dikembangkan oleh Runnymede Trust yakni dua bagian pertama yang meliputi *Exclusion* (pengecualian) dan *Violence* (kekerasan). Sementara itu penelitian ini juga akan memaparkan lebih lanjut mengenai beberapa peristiwa Islamophobia yang meliputi dampak dari pengecualian dan kekerasan terhadap komunitas muslim serta peran dari aktor-aktor sosial dalam memperkuat maupun menentang praktik-praktik Islamophobia di negara tersebut.

2.1 Aspek Pengecualian dalam Fenomena Islamophobia di India

2.1.1 Aspek Pengecualian Dalam Pekerjaan

Kasus Islamophobia di India telah menjadi isu dalam kurun waktu terakhir ini. Hal ini dikarenakan umat muslim di India yang jumlahnya minoritas sehingga menjadi sasaran ujian kebencian oleh kelompok hindu. Ujaran kebencian tersebut telah dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di India. Bahkan bukan hanya semata ujaran kebencian saja tetapi juga kelompok masyarakat hindu di India juga melakukan seruan eksplisit untuk melakukan kekerasan, mengangkat senjata, juga seruan tuntutan terhadap boikot sosial dan ekonomi terhadap umat muslim (Republika 2023).

Oleh karena itulah yang menjadikan kasus Islamophobia di India berdampak terhadap banyak aspek. Salah satu dampaknya adalah adanya

pengecualian terhadap lingkungan pekerjaan.

Data sejak tahun 2019-2020 menunjukkan ketimpangan signifikan dalam akses terhadap pekerjaan dengan gaji tetap antara kelompok Muslim dan non-Muslim di wilayah perkotaan. Hanya 15,6% dari Muslim berusia 15 tahun ke atas yang memiliki pekerjaan tetap dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan 23,3% dari populasi non-Muslim. Ketimpangan ini berkaitan erat dengan dinamika sosial-politik pasca-pemberlakuan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) tahun 2019, yang mendorong marginalisasi sistemik terhadap umat Muslim. Kebijakan tersebut berdampak pada terbatasnya akses Muslim terhadap peluang ekonomi. Akibatnya, pengecualian dalam hidup bernegara tidak hanya terjadi dalam aspek kewarganegaraan, tetapi juga dalam pasar kerja (Anadolu Agency 2022).

Berdasarkan hasil studi yang berjudul *Muslim Women Face Hiring Bias at Entry Level Jobs: Study* yang dilakukan selama 9 bulan dari Juli 2021 hingga Maret 2022. Sekitar 2.000 lamaran pekerjaan dikirimkan ke 1.000 lowongan pekerjaan di situs pencarian kerja seperti LinkedIn dan Naukri.com dengan dua profil palsu, yang satu beragama Hindu (Priyanka Sharma) dan yang lainnya beragama Muslim (Habiba Ali). Kecuali nama, semua hal lain dalam resume sengaja dibuat sama. Menurut penelitian tersebut, tingkat diskriminasi bersih untuk wanita Muslim India terhadap wanita Hindu, adalah 47,1 persen. Selain itu, penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap dua panggilan kerja yang diterima wanita Hindu, seorang wanita Muslim di India hanya mendapat satu (Bhatt 2022).

Pada tahun 2022, Sabah Khan (nama samaran), seorang profesional HR dari Lucknow, mengalami eksklusi saat wawancara kerja di sebuah perusahaan media ternama di Gurugram. Pewawancara mempertanyakan nama belakangnya karena hanya mencantumkan nama depan dalam CV dan kemudian berkomentar bahwa ia "tidak terlihat seperti seorang Muslim." Selain itu, pewawancara juga menanyakan apakah keluarganya mengizinkaninya bekerja, sebuah pertanyaan yang mencerminkan bias terhadap perempuan Muslim. Seperti dugaanya, Khan tidak menerima kabar lebih lanjut setelah wawancara tersebut (Amin 2022).

Kasus eksklusi serupa juga dialami oleh Shaila Irfan, seorang guru di jaringan sekolah berbahasa Inggris ternama di New Delhi. Pihak administrasi sekolah memintanya untuk melepas jilbab karena dianggap dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa dan staf pengajar lainnya. Salah satu bentuk upaya dalam menolak tuntutan tersebut, Irfan akhirnya memilih untuk mengundurkan diri. Namun ketika ia melamar di sekolah lain, ia kembali menghadapi pertanyaan terkait jilbabnya dalam tahapan wawancara tambahan, yang pada akhirnya berujung pada penolakan lantaran ia tetap bersikeras mempertahankan jilbabnya (Amin 2022).

Sementara itu pada tahun 2024, pemerintah negara bagian Uttar Pradesh membuat kebijakan yang mewajibkan restoran untuk menampilkan nama pemilik dan karyawan mereka. Walaupun kebijakan tersebut diklaim sebagai bentuk upaya dalam menjaga standar kesehatan dan keselamatan, namun para aktivis dan penduduk setempat menduga bahwa peraturan tersebut dibuat untuk serangan terselubung terhadap pekerja dan perusahaan muslim. Hal ini dikarenakan nama-nama di India mengindikasikan agama dan kasta sehingga ada

ketakutan yang beredar di ranah pemilik bisnis Muslim di Uttar Pradesh bahwa hal tersebut akan mengarah pada serangan atau boikot ekonomi oleh kelompok hindu garis keras (Petersen and Hassan 2024).

Pemilik usaha di Uttar Pradesh melaporkan bahwa mereka telah memecat karyawan Muslim sebagai akibat dari kebijakan tersebut, karena dikhawatirkan mereka akan menjadi sasaran boikot ekonomi. Bahkan beberapa diantaranya mempertimbangkan untuk menutup restoran. Salah satu contohnya adalah yang dialami oleh Rafiq, seorang pemilik restoran Muslim berusia 45 tahun di daerah Muzaffarnagar, Uttar Pradesh bahwa ia telah memecat sebanyak 4 karyawan muslimnya pada bulan Juli setelah polisi menuntut ia untuk mencantumkan nama semua karyawan pada tanda di luar restoran (Petersen and Hassan 2024).

“Saya harus memecat karyawan Muslim karena saya khawatir akan keselamatan mereka setelah itu” ujar Rafiq. “Mencantumkan nama akan mengidentifikasi agama seseorang, yang saya duga dimaksudkan untuk mencegah orang makan di restoran yang dikelola oleh Muslim” lanjut Rafiq. Sejauh ini Rafiq menolak tekanan polisi untuk mematuhi , namun dia mengatakan bahwa jika dipaksa, maka memungkinkan rafiq untuk menutup usahanya sama sekali (Petersen and Hassan 2024).

Selain itu, kebijakan pelarangan pengangkutan sapi untuk tujuan non pertanian berdampak besar pada industri daging dan kulit, hingga menyebabkan ribuan Muslim kehilangan mata pencaharian mereka. Akibat kebijakan tersebut, sekitar 50.000 toko daging di salah satu negara bagian India terpaksa ditutup. Produk bersertifikat halal juga menghadapi boikot dari kelompok-kelompok

ekstrimis Hindu yang menuduh bahwa konsumsi produk halal mendukung "ekspansi ekonomi Islam." Narasi ini semakin memperburuk sentimen anti-Muslim di India, dengan propaganda yang menghubungkan pendapatan dari produk halal dengan dugaan keterkaitan terhadap pendanaan terorisme (Ali and Sarwar 2024).

2.2.2 Aspek Pengecualian dalam Pemerintahan dan Politik

Adanya pengecualian dalam kasus fenomena Islamophobia di India dapat merugikan banyak pihak. Terutama aspek pengecualian dalam ranah pemerintahan dan politik. Dalam hal ini representasi Muslim dalam ranah pemerintahan dan politik sangat terlihat jelas. Hal tersebut dibuktikan ketika representasi komunitas Muslim di parlemen India, khususnya dalam Lok Sabha ke-18 (periode 2024), mengalami penurunan tajam dan kini berada pada titik terendah dalam kurun waktu enam dekade terakhir. Dari keseluruhan anggota parlemen, hanya 24 orang atau sekitar 4,4% yang berasal dari komunitas Muslim. Ketidakseimbangan ini mencerminkan semakin kecilnya keterwakilan politik Muslim dalam lembaga legislatif nasional. Penurunan ini telah berlangsung sejak tahun 1990-an, beriringan dengan meningkatnya pengaruh Partai Bharatiya Janata (BJP), yang pertama kali berhasil memperoleh lebih dari 100 kursi di Lok Sabha ke-10 (1991–1996) (Twocircles.net 2024).

Sementara itu, BJP sebagai partai yang berkuasa tidak memiliki satupun anggota parlemen yang berasal dari komunitas Muslim, yang memperkuat gambaran marjinalisasi politik terhadap kelompok tersebut dalam struktur kekuasaan nasional. Secara geografis, hanya sepuluh negara bagian dan wilayah

persatuan yang mengirimkan wakil Muslim ke parlemen. Bahkan, sejumlah wilayah seperti Uttarakhand, Sikkim, Mizoram, Meghalaya, Manipur, Goa, Chhattisgarh, dan Arunachal Pradesh belum pernah memiliki anggota parlemen Muslim sepanjang sejarah. Beberapa negara bagian yang dulunya memiliki tingkat representasi Muslim yang lebih tinggi kini mengalami penurunan, seperti Assam yang turun dari 14% menjadi 7%, Kerala dari 19% menjadi 15%, dan Uttar Pradesh dari 8% menjadi 6% (Twocircles.net 2024).

Dikutip melalui majalah harian The Hindu, bahwasanya Pemimpin Partai Samajwadi sekaligus 10 kali yaitu Azam Khan, didiskualifikasi dari keanggotaan Majelis Legislatif Uttar Pradesh pada hari Jumat setelah dijatuhi hukuman oleh pengadilan khusus MP-MLA terkait kasus ujaran kebencian yang terjadi pada tahun 2019 (The Hindu Bureau 2022).

Sekretariat Vidhan Sabha menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 125 Undang-Undang Perwakilan Rakyat 1951, serta Pasal 505(1) dan 153(A) KUHP India, keanggotaan Tuan Khan di Dewan Perwakilan Rakyat dinyatakan berakhir setelah ia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh pengadilan. Dalam kasus yang berkaitan dengan kampanye Pemilu Lok Sabha 2019, pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar ₹2.000 kepadanya karena diduga menyampaikan pernyataan yang bersifat provokatif terhadap Ketua Menteri Uttar Pradesh Yogi Adityanath dan mantan Hakim Distrik Rampur, Aunjaneya Kumar Singh (The Hindu Bureau 2022).

Menanggapi diskualifikasi Azam Khan di Lok Sabha tersebut, pemimpin AIMIM yakni Imtiaz Jaleel menunjukkan perbedaan mencolok dalam perlakuan

terhadap anggota parlemen Muslim dan non-Muslim dalam kasus diskualifikasi. Jaleel mengutip contoh Azam Khan dan putranya Abdullah Azam, veteran SP yang menghadapi tuntutan penangkapan dari Kongres pada 2019, sementara anggota parlemen BJP yang membuat pernyataan merendahkan umat Muslim tidak mendapat sanksi apapun (Maktoob 2023).

Abdullah Azam Khan, seorang anggota legislatif dari Partai Samajwadi, dilarang mengikuti Majelis Uttar Pradesh sebulan lalu, tak lama setelah pengadilan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara dalam kasus yang sudah 15 tahun berjalan. Sementara itu, Azam Khan, salah satu pemimpin senior SP, juga didiskualifikasi dari Uttar Pradesh Vidhan Sabha beberapa bulan lalu setelah dihukum dalam kasus lainnya. Jaleel juga mengkritik perlakuan diskriminatif terhadap Mohammed Faizal PP, anggota parlemen Lakshadweep yang dihukum dan didiskualifikasi meskipun Pengadilan Tinggi Kerala menanggukkan hukumannya. Ia mempertanyakan mengapa ada perbedaan perlakuan yang mencolok antara anggota parlemen Muslim dan non-Muslim dalam kasus-kasus serupa (Maktoob 2023).

Sementara itu dalam kasus lain, dikutip dalam report Organization of Islamic Cooperation bahwasanya salah satu bentuk dampak Islamophobia dari segi politiknya adalah diperkenalkannya Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan atau yang disebut sebagai Citizenship Amendment Act (CAA) oleh Pemerintah India. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 2019 lalu. India mengadopsi Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang memberikan kewarganegaraan jalur cepat kepada para migran Hindu, Sikh,

Buddha, dan Kristen yang tidak berdokumen sehingga diduga melarikan diri dari penganiayaan di negara asal mereka. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah India namun jalur cepat tersebut tidak diperkenankan kepada para migran yang beragama Islam (OIC 2020).

Adapun batas waktu untuk kelayakan kewarganegaraan adalah 31 Desember 2014, tepat lima tahun ke belakang sebelum tahun 2019 dikeluarkan amandemen tersebut. Sehingga siapa pun yang dianggap memenuhi syarat berdasarkan hukum namun tetap memasuki negara tersebut maka setelah tanggal tersebut dapat dideportasi, yaitu ketetapan sipil yang diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki hak warga negara. Pemerintah India membenarkan kelalaian ini dengan beranggapan bahwa muslim merupakan populasi mayoritas di tiga negara tetangga, sehingga mereka hanya mencoba membantu non-Muslim yang menghadapi "penganiayaan agama" di negara-negara tersebut dengan mengizinkan mereka untuk tetap berada di wilayah India. Padahal kenyataannya, CAA adalah undang-undang anti-Muslim karena memperkenalkan dasar agama untuk memberikan kewarganegaraan kepada imigran dari tiga tetangga mayoritas Muslim India, Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh (OIC 2020).

Perburuan migran ini terjadi di wilayah Assam di India, termasuk negara bagian yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan Bangladesh. Di wilayah tersebut banyak warga negara yang status kewarganegaraannya dipertanyakan sejak dari lahir hingga mendapatkan hak warga negara termasuk hak dalam mengikuti pemilu. Oleh karena itu pemerintah negara bagian dengan cepat memperluas pengadilan orang asing dan berencana untuk membuat kamp penahanan baru yang besar. Ratusan orang telah ditangkap dan ditahan karena

dicurigai sebagai migran asing. Sementara itu terdapat partai yang berkuasa memaksa orang untuk membuktikan bahwa mereka adalah warga negara bagian lain di India dan merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu yang luas sebagai bentuk acuan dari kemenangan besar Modi dalam pemilihan ulang pada bulan Mei 2019 (OIC 2020).

Modi secara sepihak menghapus status kenegaraan satu-satunya negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim di India, Jammu dan Kashmir dengan cara mencabut otonomi khusus dan mengubahnya menjadi wilayah federal tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan para pemimpin setempat. Sehingga banyak diantaranya telah ditangkap. Sebanyak 33 juta penduduk Assam harus membuktikan melalui bukti dokumenter bahwa mereka atau bahkan nenek moyang mereka adalah warga negara India sebelum awal tahun 1971 tepat ketika Bangladesh didirikan setelah memisahkan diri dari Pakistan. Pada awal tahun 2020, lebih dari 4 juta orang di India, sebagian besar Muslim, berisiko dinyatakan sebagai migran asing karena pemerintah mendorong agenda nasionalis Hindu garis keras yang menentang tradisi pluralis negara tersebut (OIC 2020).

Menjelang pemilihan umum, pemerintah India resmi menerapkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) 2019 yang kontroversial, dengan mengumumkan peraturannya pada hari Senin. Peraturan ini, yang dinamai *Peraturan Kewarganegaraan (Amandemen) 2024*, memungkinkan pemohon yang memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan India secara daring melalui portal yang telah disediakan. CAA, yang merupakan janji kampanye Partai Bharatiya Janata (BJP) dalam pemilu

2019, memberi kewarganegaraan kepada penganut Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh. Dalam hal ini tidak mencakup umat Muslim. Ketika undang-undang ini disahkan pada 2019, terjadi gelombang protes di berbagai wilayah India dan gugatan hukum terhadap CAA masih berlangsung di Mahkamah Agung (Adil 2024).

Pemimpin oposisi, Mamata Banerjee, mengkritik langkah ini sebagai taktik kampanye BJP menjelang pemilu, menyebutnya sebagai “strategi publisitas”. Namun, BJP menyambut penerapan CAA sebagai “momen bersejarah” dan bagian dari upaya memenuhi janji kampanye sebelumnya. Selain CAA, BJP juga menepati janji kampanye lainnya, termasuk pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang Seragam di negara bagian Uttarakhand, serta peresmian kuil Ram di Ayodhya oleh Perdana Menteri Narendra Modi pada Januari lalu (Adil 2024).

Beberapa pemilu sebelumnya juga mendapat sorotan atas dugaan penghalangan pemilih Muslim oleh aparat keamanan, meskipun gugatan terkait dugaan manipulasi dalam pemilu tahun 2022 akhirnya ditolak karena alasan teknis. Asaduddin Owaisi, salah satu dari anggota parlemen Muslim yang tersisa, ia mengkritik bahwa bahkan partai-partai sekuler cenderung menghindari mencalonkan kandidat Muslim karena khawatir kehilangan dukungan dari pemilih Hindu. Saat ini, hanya terdapat 27 anggota parlemen Muslim dari total 543 kursi di majelis rendah, dan tidak satu pun berasal dari BJP. Menurut penulis dan analis Ziya Us Salam, Muslim di India selama ini bergantung pada partai sekuler, tetapi kini menghadapi "krisis kepemimpinan Muslim yang serius."

Owaisi juga menuduh BJP sengaja menciptakan ketakutan terhadap Muslim, yang membuat kandidat Muslim semakin sulit memenangkan pemilu (Agence France-Presse 2024).

Representasi politik Muslim di India terus mengalami kemunduran. Mohammad Azam Khan, yang merupakan anggota parlemen Muslim terakhir dari Rampur, mengundurkan diri setelah menghadapi lebih dari 80 kasus hukum yang muncul setelah kemenangan BJP dalam pemilu 2017. Ia kemudian dipenjara pada 2023 akibat tuduhan ujaran kebencian terhadap lawan politiknya dari BJP (Agence France-Presse 2024).

Menurut laporan South Asia Justice Campaign (Mei 2024), pemerintah negara bagian Assam secara sistematis mencabut hak pilih ratusan ribu warga yang diklasifikasikan sebagai "Doubtful Voters" (D-voters), yang mayoritas berasal dari komunitas Muslim Bangladesh. Kategori ini diterapkan secara sepihak oleh otoritas pemilu terhadap individu yang status kewarganegaraannya dianggap tidak pasti, meskipun banyak dari mereka telah tinggal di India selama beberapa generasi. Penghapusan dari daftar pemilih ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan merupakan bentuk eksklusi politik yang bermotif agama. Dalam banyak kasus, tidak tersedia mekanisme hukum yang transparan untuk membela diri atau mengkonfirmasi status kewarganegaraan. Akibatnya, komunitas Muslim yang terdampak kehilangan hak partisipasi politik dan semakin terdorong ke pinggiran kehidupan sosial. Fenomena ini mencerminkan pola eksklusi sistemik dan Islamophobia institusional, yang diperkuat oleh kebijakan-kebijakan seperti National Register of Citizens (NRC) dan Citizenship

Amendment Act (CAA), yang secara jelas mengecualikan umat Muslim dalam proses legalisasi kewarganegaraan (South Asia Justice Campaign 2024).

Pada bulan April hingga Juni 2024, terjadi proses delimitasi atau pengaturan ulang batas daerah pemilihan di negara bagian Assam berdampak besar terhadap hak pilih komunitas Muslim. Salah satu yang terdampak adalah Sanwar Hussain, seorang sopir bus yang dipindahkan ke daerah pemilihan baru yang berjarak 130 KM dari tempat tinggalnya. Hal ini secara langsung menghambat aksesnya ke TPS dan mencerminkan masalah yang lebih luas akibat perubahan batas wilayah pemilihan. Delimitasi ini secara signifikan mengurangi jumlah pemilih Muslim di beberapa daerah strategis, yang berpotensi memperlemah representasi politik mereka dalam sistem demokrasi India (Ali and Sarwar 2024).

Dilansir dari AP News yang berjudul *India's Parliament has fewer Muslims as strength of Modi's Party Grows* pada tahun 2024 bahwa sejak Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2014, keterwakilan Muslim dalam parlemen India mengalami penurunan drastis. Jumlah anggota parlemen Muslim menyusut dari 30 menjadi 25 dari total 543 kursi, tanpa ada satupun yang berasal dari Partai Bharatiya Janata (BJP). Menurut Ali Khan Mahmudabad, seorang ilmuwan politik dari Universitas Ashoka, situasi ini mencerminkan pergeseran dari sekadar marjinalisasi menuju eksklusi aktif terhadap Muslim dalam politik India (Saaliq and Pathi 2023).

Jika dilihat dari segi demografis nya, jumlah penduduk Muslim meningkat dari 11% pada pertengahan 1980-an menjadi 14% saat ini. Namun,

proporsi kursi parlemen yang mereka tempati justru menurun dari 9% menjadi kurang dari 5%. Saat ini, sekitar 90% anggota parlemen berasal dari komunitas Hindu, meskipun populasi Hindu sendiri mencakup sekitar 80% dari total penduduk India (Saaliq and Pathi 2023).

Dominasi BJP yang semakin kuat menyebabkan partai oposisi semakin enggan mencalonkan kandidat Muslim, karena khawatir akan kehilangan dukungan dari pemilih Hindu. Mahmudabad menekankan bahwa absennya representasi politik Muslim berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya negara, sekaligus menghambat perjuangan komunitas dalam bidang pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dasar (Saaliq and Pathi 2023).

BJP sendiri membantah adanya diskriminasi berbasis agama, dengan menyatakan bahwa keterwakilan politik ditentukan oleh hasil pemilu. Namun, para kritikus menilai BJP tidak bersungguh-sungguh dalam mencalonkan kandidat Muslim. Salam menekankan bahwa komunitas Muslim semakin tersingkir dari proses demokrasi, baik melalui pembatasan pencalonan, perubahan wilayah pemilihan, maupun penghalangan hak suara, yang tidak hanya menciptakan intimidasi, tetapi juga upaya sistematis untuk menghilangkan peran Muslim dari politik India (Agence France-Presse 2024).

Pada 13 Mei 2024, di Hyderabad, Telangana, Madhavi Latha, seorang kandidat dari Partai Bharatiya Janata (BJP), ditangkap setelah sebuah video yang menunjukkan dirinya mengintimidasi pemilih Muslim perempuan di tempat pemungutan suara hingga menjadi viral. Dalam rekaman tersebut, Latha terlihat

meminta perempuan bercadar untuk membuka penutup wajah mereka guna memverifikasi identitas, meskipun ia tidak memiliki kewenangan resmi untuk melakukan tindakan tersebut. Perbuatannya menyebabkan ketegangan di lokasi pemungutan suara dan menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia serta partai oposisi, yang menganggap hal ini sebagai bentuk intimidasi terhadap pemilih Muslim.

Seorang petugas pemilu yang bertugas di lokasi melaporkan bahwa tindakan Latha membuat seorang pemilih perempuan merasa terintimidasi hingga akhirnya memilih meninggalkan tempat pemungutan suara tanpa menggunakan hak pilihnya. Insiden ini memicu perdebatan mengenai kebebasan dan keamanan pemilih dalam proses demokrasi, terutama bagi kelompok minoritas yang kerap menghadapi tekanan dalam menyalurkan hak suara mereka. Penangkapan Latha menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap tindakan yang dapat menghambat partisipasi politik warga negara, sekaligus menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan Muslim dalam menggunakan hak pilih mereka di tengah meningkatnya ketegangan politik dan sosial di India.

Dari beberapa kasus pengecualian yang terdapat di India sebagai dampak dari adanya Islamophobia, tentunya tidak lepas dari adanya tanggapan dari pemerintah di wilayah India. Adapun respons pemerintah India terhadap tuduhan eksklusi terhadap komunitas Muslim, khususnya dalam konteks pengesahan Citizenship Amendment Act (CAA) tahun 2019, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi minoritas agama yang teraniaya dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.

Pemerintah menyatakan bahwa CAA bukanlah instrumen diskriminatif, melainkan mekanisme perlindungan bagi kelompok yang secara historis tidak memiliki negara, seperti Hindu, Sikh, Kristen, Buddha, Jain, dan Parsi. Namun, kebijakan ini secara eksplisit mengecualikan Muslim, termasuk kelompok-kelompok yang juga mengalami penganiayaan, seperti Ahmadiyah dan Syiah dari Pakistan, tanpa justifikasi hukum yang memadai (Saaliq 2024).

Ketika gelombang protes menyebar ke seluruh negeri dan menimbulkan kekerasan komunal yang menewaskan puluhan orang, pemerintah tetap mempertahankan posisinya dan menyatakan bahwa “India tidak mengambil kewarganegaraan siapapun, tetapi hanya memberikan kepada yang membutuhkan.” Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang menegaskan bahwa “tidak ada warga India, dari agama apa pun, yang akan kehilangan haknya” akibat CAA, sekaligus membantah bahwa undang-undang ini memiliki dimensi Islamofobik atau eksklusif. Akan tetapi, pengamat dan organisasi HAM internasional menyebut bahwa pengecualian terhadap Muslim dari jalur kewarganegaraan tersebut menunjukkan bentuk eksklusif yang terinstitusionalisasi dan bertentangan dengan prinsip sekularisme konstitusional India (Saaliq 2024).

2.2 Aspek Kekerasan dalam Fenomena Islamophobia di India

Islamophobia di India sering kali berujung pada berbagai bentuk kekerasan, mulai dari pemukulan, diskriminasi sosial, hingga serangan brutal

terhadap komunitas Muslim. Faktor utama yang memicu kekerasan ini antara lain propaganda kebencian, ketegangan politik, serta kurangnya perlindungan hukum bagi korban. Namun yang paling mendasari dari faktor pemicu tindak kekerasan yang ada di India adalah karena diberlakukannya Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) pada tahun 2019 yang menimbulkan pergolakan massa dan berakhir pada unjuk kekerasan

Sebagai bentuk perlawanan terhadap diberlakukannya Citizenship Amendment Act (CAA), aksi protes besar-besaran terjadi di berbagai wilayah India. Salah satu yang paling menonjol adalah demonstrasi yang berlangsung selama lebih dari satu bulan di kawasan Shaheen Bagh, wilayah pemukiman kelas pekerja Muslim di Delhi. Dalam aksi tersebut, sekitar seribu pengunjung rasa yang mayoritas merupakan perempuan Muslim melakukan pendudukan di salah satu jalan utama yang menghubungkan ibu kota New Delhi dengan kota satelit Noida (Jayasekera 2020).

Setiap hari, ratusan hingga ribuan warga dari berbagai latar belakang agama turut bergabung, mengekspresikan solidaritas lintas agama. Mereka secara kolektif menyuarakan slogan “Hindu, Muslim, Sikh, Issai, aapas mein hain bhaai bhaai,” yang secara harfiah berarti “Hindu, Muslim, Sikh, dan Kristen adalah saudara,” sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan diskriminatif berbasis agama. Meskipun aparat kepolisian berupaya membubarkan aksi dengan alasan gangguan terhadap arus lalu lintas, para demonstran tetap bertahan dan menunjukkan sikap kooperatif dengan hanya memberikan akses kepada kendaraan darurat seperti ambulans dan kendaraan sekolah. Aksi ini

mencerminkan perlawanan sipil yang damai dan terorganisir serta menjadi representasi penting dari resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. Adanya bentuk perlawanan tersebut memunculkan kekhawatiran bagi pemerintah karena kehidupan di ibu kota negara, Delhi terus diganggu oleh protes anti CAA setiap hari (Jayasekera 2020).

Dilansir dari Al Jazeera pada 29 September 2021 dengan judul *Assam evicts thousands in violence-hit region*, dilaporkan bahwa lebih dari 1.300 keluarga, mayoritas berasal dari komunitas Muslim, terdampak oleh operasi penggusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah Assam di wilayah Darrang. Penggusuran ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan kawasan yang dianggap ilegal oleh pihak berwenang, meskipun banyak di antara warga tersebut yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Selama operasi tersebut, dua warga tewas dan lebih dari 30 orang, termasuk beberapa petugas polisi terluka. Video yang beredar menunjukkan seorang pria yang sedang berlari ditembak oleh petugas keamanan, yang semakin memperburuk citra operasi tersebut dan memicu kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan kelompok sosial. Pemerintah Assam membela kebijakan ini dengan alasan penegakan hukum terhadap penduduk yang dianggap sebagai imigran ilegal, namun banyak pihak yang menilai kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi, terutama terhadap komunitas Muslim yang sebagian besar berasal dari Bangladesh.

Sementara itu pada bulan Agustus 2023, lebih dari 300 rumah dan toko milik warga Muslim di Distrik Nuh dihancurkan oleh aparat keamanan dari pemerintahan sayap kanan India dengan menggunakan bulldoser. Tindakan

tersebut menunjukkan sentimen anti Muslim yang terus digaungkan oleh Pemerintahan partai BJP. Kebijakan penghancuran properti ini telah memicu kecaman dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan masyarakat internasional, yang menganggap tindakan tersebut dapat memperkeruh ketegangan agama yang sudah lama ada di India, di mana hubungan antara komunitas Hindu dan Muslim seringkali dipengaruhi oleh kebijakan politik yang berpihak kepada kelompok mayoritas Hindu (Mustaqim 2023).

Kasus serupa juga terjadi di kota Gurugram, yang terletak di pinggiran New Delhi dan dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit milik perusahaan-perusahaan besar dunia, seorang imam muda tewas setelah dikeroyok dan ditikam oleh massa, sementara salah satu masjid di kota itu dibakar. Insiden yang sama juga terjadi di Sohna, sekitar 25 kilometer dari Gurugram, di mana sebuah masjid juga diserang. Kekerasan yang terjadi selama sepekan terakhir menyebabkan 6 orang meninggal dunia, termasuk seorang petugas polisi Muslim dan seorang warga Sikh, serta dua orang yang diduga bagian dari kelompok Bajrang Dal. Namun, tindakan pembalasan dengan menggunakan bulldoser justru menasar secara sepihak terhadap properti milik warga Muslim. Mulai dari rumah, toko, hingga lapak dagang, baik permanen maupun semi permanen. “Wilayah Mewat mereka hancurkan. Semua ini untuk menyenangkan Bajrang Dal,” ujar Rasheed. Tindakan pembongkaran seperti ini dalam beberapa tahun terakhir menjadi tren di negara-negara bagian yang dipimpin oleh BJP yang kerap menargetkan bangunan milik warga Muslim yang dituduh terlibat dalam konflik agama maupun tuduhan lainnya (Mustaqim 2023).

Kasus lainnya, dilansir dari laman berita Al-Jazeera yang berjudul *India*

election fairness concerns amid Muslim vote suppression allegations pada tahun 2024 bahwa Pada 7 Mei 2024, di distrik Sambhal, Uttar Pradesh, terjadi insiden yang memicu penindasan terhadap pemilih Muslim dalam pemilu India. Mustagir Qureshi, seorang pekerja harian, datang ke tempat pemungutan suara di desa Obri pada pagi hari untuk memberikan suaranya. Di sana, ia melihat puluhan pria berpeci dan wanita bercadar berlarian menghindari serangan tongkat dari aparat kepolisian. Dalam kekacauan tersebut, ayahnya yang berusia 70 tahun, Raees Qureshi, mengalami cedera serius setelah dipukul di dada hingga pingsan. Peristiwa ini terekam dalam video yang kemudian menyebar luas di media sosial, memperlihatkan Mustagir dan saudaranya, Alam yang berusaha membawa Raees yang terluka sambil berkonfrontasi dengan aparat terkait tindakan kekerasan tersebut (Ali and Sarwar 2024).

Beberapa jam setelah kejadian, Mustagir kembali ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, tetapi polisi menghentikannya, menyita, dan merobek kartu pemilih serta kartu identitas Aadhar miliknya. Ia kemudian ditahan dan dibawa ke kantor polisi Asmauli, di mana ia mengaku mengalami pemukulan serta intimidasi. Mustagir dipaksa untuk merekam pernyataan yang menyangkal adanya kekerasan terhadap dirinya dan ayahnya, dengan ancaman kekerasan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penembakan. Insiden ini memperkuat kekhawatiran mengenai penindasan terhadap pemilih Muslim di India, dengan laporan serupa juga muncul dari desa-desa lain di Sambhal, menunjukkan pola intimidasi dan kekerasan yang menghambat partisipasi politik komunitas Muslim (Ali and Sarwar 2024).

Sementara itu pada Maret 2024, di negara bagian Gujarat, terjadi peristiwa yang menunjukkan hubungan antara kebijakan penggusuran dan hak politik komunitas Muslim. Jukub Patel, seorang nelayan Muslim asal desa Navadra di distrik Devbhoomi Dwarka, kehilangan hak pilihnya setelah rumahnya dihancurkan oleh pemerintah yang dikuasai Partai Bharatiya Janata (BJP) dengan alasan bahwa bangunan tersebut dianggap ilegal. Tidak lama setelah penggusuran, namanya juga dicoret dari daftar pemilih, yang secara langsung mempengaruhi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Patel, bersama sejumlah nelayan Muslim lainnya, menghadapi berbagai kendala administratif dalam mengurus kembali kartu pemilih mereka, meskipun telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada otoritas terkait.

Kasus yang dialami Patel bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tren yang lebih luas terkait penghapusan pemilih Muslim dari daftar pemilih di Gujarat. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa praktik serupa terjadi di berbagai wilayah lain, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Partai oposisi serta kelompok masyarakat sipil menilai bahwa tindakan ini berpotensi menjadi bagian dari strategi sistematis untuk mengurangi keterwakilan politik komunitas Muslim dalam pemilu. Fenomena ini juga menggambarkan bagaimana kebijakan administratif dapat secara langsung berdampak pada hak-hak sipil dan politik kelompok minoritas, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai kredibilitas dan integritas proses demokrasi di Gujarat.

Kasus kekerasan lain juga terjadi dalam ranah pendidikan. Adanya

kesenjangan pendidikan antara Muslim dan Hindu berkisar antara 10-15% yang disebabkan oleh hambatan struktural yang terus berlanjut. Salah satu contohnya adalah kasus kekerasan di sekolah, dimana seorang anak muslim berusia tujuh tahun mengalami pemukulan oleh teman-temannya atas perintah gurunya. Selain itu, di beberapa negara bagian, perempuan Muslim yang mengenakan jilbab menghadapi larangan mengakses pendidikan, hingga menyebabkan ribuan dari mereka terpaksa berhenti sekolah selama bertahun-tahun. Upaya hukum untuk menentang kebijakan ini pun tidak membuahkan hasil, karena pengadilan memutuskan bahwa jilbab bukan merupakan bagian utama dari ajaran Islam (Ozkan 2024).

Dalam periode 2019–2024, terjadi peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis agama yang dilakukan oleh aktor non-negara ekstrimis Hindu yang memiliki kedekatan ideologis dengan Partai Bharatiya Janata (BJP). Kelompok-kelompok ini secara sistematis meningkatkan intensitas dan cakupan penargetan kekerasan terhadap komunitas minoritas, khususnya Muslim, kristen adivasi, dan dalam beberapa kasus bahkan terhadap umat Hindu yang secara keliru diasumsikan sebagai Muslim (South Asia Justice Campaign 2024).

Sedikitnya terdapat 12 warga Muslim, seorang perempuan kristen adivasi dan seorang pemuda Hindu yang diduga Muslim menjadi korban tewas dalam insiden penghakiman massa (mob lynching) yang bermotifkan agama. Bukan hanya itu, namun kekerasan massal terhadap komunitas Muslim tercatat terjadi di lima negara bagian di India yang masing-masing dipicu oleh motif yang beragam. Mulai dari dugaan pelanggaran keagamaan hingga isu-isu lokal yang dimanipulasi

secara politik. Kondisi ini diperparah dengan munculnya serangan ‘balasan terhadap Muslim di empat negara bagian, termasuk kekerasan anti Hindu yang terjadi di negara tetangga, Bangladesh. Narasi pembalasan ini diproduksi dan diperkuat oleh kelompok-kelompok ekstremis serta saluran-saluran media partisan, sehingga memperluas spektrum kekerasan sektarian lintas batas negara (South Asia Justice Campaign 2024).

Adapun yang memperburuk situasi adalah kenyataan bahwa para pelaku kekerasan dalam berbagai insiden ini tidak hanya luput dari akuntabilitas hukum saja, akan tetapi secara aktif diakomodasi, diberi penghargaan, bahkan dijanjikan perlindungan politik oleh sejumlah tokoh dan pemimpin BJP. Hal ini menunjukkan adanya pengecualian penegakan hukum sistemik yang memungkinkan kekerasan sektarian berulang tanpa konsekuensi hukum, serta memperlihatkan bagaimana aparatur negara digunakan atau dibiarkan untuk membiarkan kekerasan atas nama identitas agama berlangsung (South Asia Justice Campaign 2024).

Dengan adanya berbagai kasus kekerasan yang timbul akibat dampak dari Islamophobia yang terdapat di India, tentunya menuai perhatian dan juga tanggapan dari pemerintah India. Adapun respons dari pemerintah India terhadap kekerasan berbasis agama di dalam negeri cenderung ditandai oleh penolakan terhadap segala bentuk tuduhan keterlibatan langsung maupun pembiaran institusional. Dalam berbagai peristiwa kekerasan, pemerintah secara konsisten membantah adanya peran negara, baik dalam bentuk kelalaian aparat keamanan maupun dalam bentuk kebijakan yang memperburuk ketegangan antar agama.

Hal ini tercermin secara nyata dalam kasus peresmian Kuil Ram di Ayodhya pada 22 Januari 2024, yang dibangun di atas reruntuhan Masjid Babri sebuah situs yang menjadi simbol dari konflik Hindu-Muslim selama lebih dari tiga dekade. Peletakan batu pondasi pertama pada tahun 2020 dan Peresmian kuil tersebut dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Narendra Modi dalam sebuah upacara kenegaraan yang dikemas sebagai momen kebangkitan spiritual bangsa Hindu. Namun, tidak terdapat inisiatif negara untuk mengakui dimensi historis kekerasan yang mengiringi peristiwa pembongkaran masjid pada 1992 maupun dampak sosial dan psikologis yang dialami komunitas Muslim. Sebaliknya, narasi resmi yang dikembangkan oleh negara dan elite politik justru menekankan pada kemenangan simbolik umat hindu (mayoritas), seraya mengabaikan pentingnya rekonsiliasi antar agama (Banerjee, Saaliq, and Pathi 2024).

BAB 3

ASPEK PRASANGKA DAN DISKRIMINASI DALAM FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI INDIA

Bab ini akan melanjutkan pembahasan mengenai Islamophobia di India dengan mengeksplorasi dua aspek lain dalam kerangka Runnymede Trust, yaitu *Discrimination* (diskriminasi) dan *Prejudice* (prasangka). Diskriminasi dapat terlihat dalam pembatasan akses komunitas Muslim terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan beragama. Sementara itu, prasangka tercermin dalam stereotip serta narasi negatif yang tertanam dalam kebijakan negara dan pemberitaan media. Kedua aspek ini tidak hanya memperdalam marginalisasi Muslim di India, tetapi juga berkontribusi dalam mempertahankan ketimpangan sosial dan politik yang semakin tajam di tengah dinamika masyarakat yang kompleks.

3.1 Aspek Prasangka dalam Fenomena Islamophobia di India

Prasangka dalam Islamophobia dapat muncul dalam berbagai bentuk, terutama melalui media dan interaksi sosial sehari-hari. Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik dan sering kali menjadi alat penyebaran stereotip negatif terhadap umat Islam. Pemberitaan yang tidak berimbang serta konten bermuatan kebencian di berbagai platform media dapat memperkuat stigma terhadap Muslim dan mendorong tindakan diskriminatif.

Selain itu, prasangka juga berkembang dalam kehidupan sosial melalui ujaran kebencian serta stereotip yang muncul dalam percakapan sehari-hari. Wacana yang sarat dengan prasangka ini semakin memperburuk citra Muslim di masyarakat dan berkontribusi pada meningkatnya kasus diskriminasi serta

kekerasan berbasis agama. Oleh karena itu, memahami peran media dan komunikasi sosial sebagai sarana utama dalam menyebarkan Islamophobia menjadi hal yang krusial dalam menganalisis fenomena ini di berbagai lapisan masyarakat India.

3.1.1 Prasangka Melalui Media

Dinamika kasus *prejudice* Islamophobia melalui media salah satunya terjadi pada saat pandemi Covid-19. Di masa pandemi Covid-19, banyak kerugian dan dampak yang ditimbulkan karena adanya pandemi. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 adalah sebagian kelompok anti-muslim di beberapa negara justru malah memanfaatkan krisis pandemi tersebut untuk memicu kebencian terhadap muslim. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa klaim di media sosial yang tersebar. Pada saat itu media sosial dibanjiri dengan klaim bahwa Muslim melanggar aturan karantina dengan tetap menghadiri masjid untuk melakukan ibadah shalat yang membuat para muslim diserang melalui media sosial. Di India misalnya, elemen Islamophobia muncul pada saat kasus Covid-19 dilaporkan melalui majalah Jamaah Tabligh ditandai dengan tagar #Jihadcorona dan #Biojihad hingga menjadi trending di twitter. Sehingga hal tersebut menyebabkan beredarnya di media sosial soal berita palsu yang menduga bahwa umat muslim turut andil atas penyebaran virus corona di India. Hal ini menjadikan sebuah ancaman bagi umat muslim di India pada saat itu (OIC 2020).

Menanggapi adanya analisis ujaran kebencian oleh media sosial di India terhadap pemberitaannya mengenai muslim, terdapat salah satu media populer di India berupa saluran televisi yaitu Republic TV yang kontroversial terhadap

Muslim di India. Hal ini dibuktikan pada saat awal pandemi COVID 19 di India, saluran berita seperti Republic TV dan Tines Now (satu media yang sama dengan Times of India) sering menayangkan debat di jam tayang utama untuk membahas pertemuan jamaah Tabligh di New Delhi. Namun sajian berita seperti itu dapat memperkuat prasangka negatif terhadap Muslim dan ikut memicu kebencian dengan menimbulkan perlakuan tidak adil di lingkungan masyarakat. Banyak pengamat dan lembaga hak asasi manusia menilai bahwa media-media ini turut memperbesar diskriminasi terhadap Muslim selama masa pandemi tersebut (Republic TV 2020).

Sebuah laporan dari Republic TV menyatakan bahwa sekitar 62% kasus positif COVID-19 di India terkait dengan acara Tablighi Jamaat yang berlangsung di Delhi. Informasi ini kemudian digunakan untuk membangun narasi bahwa kelompok Muslim tersebut menjadi "*superspreaders*" virus. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Menteri Urusan Minoritas India yaitu Mukhtar Abbas Naqvi, yang menuduh anggota Tablighi secara sengaja menyebarkan virus, bahkan menyindir bahwa upaya mereka mendonorkan plasma hanya lah cara untuk memperbaiki citra. Framing seperti ini, baik oleh media maupun tokoh politik, turut memperkuat stereotip negatif terhadap komunitas Muslim dan memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya Islamophobia yang diperkuat melalui pemberitaan dan pernyataan resmi pemerintah (Republic TV 2020).

Dalam hal lain, ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Cristophe Jaffrelot dan Vihang Junle (2020) menunjukkan bahwa Republic TV, khususnya melalui tayangan acara *The Debate* yang dipandu Arnab Goswami, secara

konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap pemerintah India yang dipimpin oleh BJP. Dalam analisis terhadap 1.779 episode debat dari rentang tahun 2017 hingga tahun 2020, ditemukan bahwa Republic TV secara konsisten bias mendukung pemerintah Modi dan kebijakannya. Sementara itu, isu-isu krusial seperti ekonomi, kesehatan, dan pertanian hanya muncul dalam 1% dari debat. Saluran Republic TV juga diketahui mempromosikan narasi pro-pemerintah dan menepikan suara-suara kritis terhadap ideologi BJP dengan tagar yang menyanjung Modi dan mengagungkan kebijakan pemerintah. Temuan ini tentunya memperkuat kritik bahwa Republic TV tidak berfungsi sebagai media independen, melainkan sebagai corong politik yang memperdalam polarisasi publik (Jaffrelot and Jumle 2020).

Zee News juga secara sistematis menyebut “Love Jihad” yang menampilkan gambaran negatif tentang komunitas Muslim di India, terutama dalam konteks hubungan antara agama yang berbeda. Dalam liputannya, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim khususnya perempuan Hindu sering digambarkan seolah-olah menjadi ancaman tersembunyi bagi nilai-nilai budaya dan keamanan negara. Cara penyajian ini membuat Muslim terlihat sebagai kelompok yang mencurigakan dan manipulatif. Selain itu, narasi seperti ini juga memperkuat politik identitas berbasis agama yang sedang berkembang di bawah pemerintahan nasionalis Hindu (Zee News 2020).

Sementara itu masih di saluran berita yang populer di India, Republic TV kerap menyoroti isu “*Love Jihad*” dengan gaya narasi pemberitaan yang sensasional dan menakutkan, bahkan seringkali sajian berita Republic TV menggambarkan pria Muslim sebagai pelaku untuk memikat hati perempuan

Hindu dengan tujuan berpindah agama. Melalui siaran berita maupun diskusi panel yang ditayangkan secara berulang, tayangan tersebut mengangkat beberapa kasus dugaan penculikan atau pernikahan antar agama seolah merupakan bagian dari sebuah ancaman sistemik terutama ketika menampilkan liputan pengesahan undang-undang anti *Love Jihad* di Uttar Pradesh. Oleh karena itu framing yang digunakan jarang memberikan ruang bagi perempuan maupun keluarga kedua belah pihak dalam mengutarakan suara dan pendapatnya, tetapi justru berita yang disajikan semakin memperkuat ketakutan dan prasangka buruk terhadap Muslim (Republic TV 2024).

Selain dari Republic TV pula, terdapat salah satu media india bernama Hindustan Times kerap memberitakan Muslim dengan narasi yang cukup kontroversial seperti *'Muslim leaders are constantly lying': BJP MP on Waqf Bill* yang berarti *'Para pemimpin Muslim terus-menerus berbohong': Anggota parlemen BJP tentang RUU Wakaf*. Sajian pemberitaan ini membahas tentang pernyataan kontroversial Manoj Tiwari yang menuduh beberapa pemimpin Muslim berbohong terkait RUU Amandemen Waqf yang semakin memperburuk ketegangan politik (Hindustan Times 2025).

Sementara itu, Hindustan Times juga kerap melaporkan upaya BJP dalam menjangkau komunitas Muslim dengan tujuan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan representasi yang adil dalam program kesejahteraan sosial dan mengurangi potensi konsolidasi komunitas minoritas sebagai kekuatan oposisi, Namun sayangnya pemberitaan media ini kerap dikemas dengan menghadirkan narasi yang memuat stereotip negatif seperti membuat judul yang clickbait dengan menyebut Umat Islam adalah kelompok

agama termiskin di India dan diskriminasi dengan menyebut kata minoritas terhadap Muslim (Hindustan Times 2025).

Pada awal bulan Mei 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi berpidato dalam sebuah kampanye politik di negara bagian Madhya Pradesh. Dalam pidatonya, ia menyerang partai oposisi sambil mengajak masyarakat untuk memilih dengan hati-hati dalam pemilu tahun ini, yang berlangsung dalam tujuh tahap dan berakhir pada 1 Juni 2024. Modi mengatakan bahwa India sedang berada di masa penting dalam sejarahnya, dan pemilih harus memilih antara dua pilihan, yakni “Vote Jihad” atau “Ram Rajya.” (Rajvanshi 2024).

Istilah “Vote Jihad” digunakan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) dan para pendukungnya untuk menggambarkan suara dari komunitas Muslim seolah-olah sebagai ancaman. Sementara itu, “Ram Rajya” merujuk pada cita-cita pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Hindu yang diambil dari Dewa Ram. Istilah ini pertama kali ramai diperbincangkan setelah seorang politisi oposisi bernama Maria Alam menggunakannya saat kampanye di negara bagian Uttar Pradesh. Ia menyerukan kepada warga Muslim untuk menggunakan “Vote Jihad” demi mengalahkan BJP. Namun, pihak kepolisian menuduhnya melakukan pelanggaran hukum karena menggunakan isu agama untuk mendapatkan suara. Meski begitu, BJP terus menggunakan istilah ini untuk menyerang partai-partai oposisi seperti Partai Kongres, yang ikut pemilu dalam koalisi bernama "INDIA." Istilah ini juga digunakan untuk menimbulkan perpecahan antara umat Hindu dan Muslim, khususnya melalui media sosial (Rajvanshi 2024).

Penggunaan istilah ini sangat sering hingga sebuah laporan dari organisasi nirlaba bernama *The London Story* (TLS) mencatat sedikitnya 21 unggahan di bulan Maret dan 33 unggahan di bulan April di mana akun resmi Facebook BJP dan akun yang terkait dengannya menyebarkan narasi bahwa umat Muslim melakukan “Vote Jihad.” Salah satu contohnya datang dari Vishwa Hindu Parishad (VHP), organisasi nasionalis Hindu ekstrem, yang menyebut umat Muslim sebagai “jihadis” dan menyalahkan mereka karena dituduh melakukan konspirasi pemilu. TLS menyatakan bahwa kampanye ini merupakan bagian dari penyebaran informasi palsu yang tujuannya adalah untuk merusak hak pilih sekitar 200 juta Muslim di India. Direktur Eksekutif TLS, Ritumbra Manuvie, menyebut narasi “jihad” seperti ini sangat berbahaya karena dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap Muslim, dan hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya (Rajvanshi 2024).

Dilansir dari studi *Islamophobia in the Digital Age* yang diterbitkan oleh Dewan Islam Victoria di Kanada menyoroti bahwa tidak ditemukan adanya penghapusan ujaran kebencian anti-Muslim di Twitter serta mengidentifikasi India sebagai sumber utama penyebaran Islamophobia di media sosial. Studi ini menganalisis data selama dua tahun, dari 28 Agustus 2019 hingga 27 Agustus 2021, dan menemukan bahwa India mencatat jumlah cuitan Islamophobia tertinggi, yaitu sebanyak 871.379 unggahan. Amerika Serikat menempati posisi kedua dengan 289.248 unggahan, diikuti oleh Inggris dengan 196.376 unggahan. Lebih lanjut, laporan ini menyoroti bahwa tingginya tingkat Islamophobia di India berakar pada normalisasi kebencian terhadap umat Muslim yang dilakukan oleh Partai Bharatiya Janata (BJP). Normalisasi ini berkontribusi pada

meningkatnya penyebaran sentimen anti-Muslim di ruang digital, khususnya di platform Twitter (Prevent Watch 2022).

Pada tahun 2023, dilansir dari India Hate Lab (IHL), terdapat 668 insiden ujaran kebencian yang menargetkan umat Muslim di India. Jumlah insiden ini meningkat secara signifikan dari 255 pada paruh pertama tahun 2023 menjadi 413 pada paruh kedua, mencerminkan peningkatan sebesar 62%. Sebagian besar insiden (75%) terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), termasuk wilayah persatuan yang berada di bawah pemerintah pusat yang dipimpin BJP serta Wilayah Ibu Kota Nasional (NCT) Delhi. Di antara delapan negara bagian dengan jumlah insiden tertinggi, enam diantaranya secara konsisten diperintah oleh BJP sepanjang tahun 2023, sementara dua lainnya sempat diperintah BJP sebelum menyelenggarakan pemilihan legislatif. Sebanyak 36% dari total insiden melibatkan seruan eksplisit untuk melakukan kekerasan terhadap umat Muslim, dengan 77% di antaranya terjadi di wilayah yang berada di bawah pemerintahan BJP (India Hate Lab 2024).

Selain itu, terdapat 1.165 acara ujaran kebencian langsung yang menargetkan minoritas muslim dan kristen pada tahun 2024, 995 video ditelusuri kembali terkait sumber aslinya di media sosial, munculnya video ujaran kebencian tersebut bermula atau pertama kali disiarkan secara langsung. Adapun Youtube dan Facebook menjadi platform utama dalam menyebarkan ujaran kebencian, dengan Facebook menyumbang sebanyak 495 video sementara sebanyak 211 video dibagikan melalui kanal Youtube. Khususnya 266 video ujaran kebencian anti minoritas yang disampaikan oleh para pemimpin senior partai BJP (Bharatiya Janatha Party), yaitu partai terkuat dari organisasi sayap

kanan yang berada di India. Ujaran kebencian tersebut disiarkan langsung melalui kanal Youtube, Facebook, dan X melalui akun resmi partai dan para pemimpin pada saat pemilu (India Hate Lab 2024).

Peningkatan tajam insiden ujaran prasangka negatif yang menargetkan umat Muslim di India sepanjang tahun 2020 dan 2024 tidak dapat dipisahkan dari konteks politik dan kebijakan yang berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act/CAA) pada tahun 2019. Dalam konteks politik, isu identitas agama digunakan sebagai alat untuk mengkonsolidasikan dukungan dalam bentuk ujaran kebencian sebagai strategi yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga mengarah pada potensi kekerasan. Oleh karena itu, peningkatan insiden kebencian yang terjadi pasca diberlakukannya CAA mencerminkan bagaimana sebuah kebijakan negara dapat menjadi pemicu polarisasi sosial yang dalam, terutama ketika dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperkuat dominasi kekuasaan melalui eksklusi terhadap kelompok minoritas.

Sementara itu pemerintah India menunjukkan respons yang minim dan sering kali bersifat pasif terhadap peningkatan tajam prasangka anti-Muslim di ruang publik, meskipun data empiris menunjukkan eskalasi signifikan dalam ujaran kebencian yang dilontarkan terhadap komunitas Muslim. Menurut laporan dari India Hate Lab yang dikutip oleh Reuters (2024), sepanjang tahun 2023 tercatat 668 insiden ujaran kebencian anti-Muslim, dan dari jumlah tersebut, sekitar 75% terjadi di negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP). Bahkan, dalam 20% insiden tersebut, pelaku ujaran kebencian adalah

pejabat publik, termasuk tokoh politik yang secara terang-terangan menyebarkan narasi kebencian berbasis agama. Namun, pemerintah pusat tidak mengambil langkah hukum yang tegas untuk mengecam atau menindak para pelaku, dan sebaliknya justru kerap membantah bahwa ujaran-ujaran tersebut mencerminkan kebijakan negara. Tidak ada undang-undang khusus atau instrumen hukum baru yang diperkenalkan untuk membatasi penyebaran kebencian berbasis agama, dan lembaga penegak hukum cenderung tidak responsif terhadap laporan pelanggaran, terutama bila pelakunya berasal dari lingkaran kekuasaan. Dalam konteks ini, respon pemerintah terhadap prasangka berbasis agama tidak hanya bersifat pasif tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk menormalisasi retorika intoleran dalam wacana politik nasional, sehingga memperkuat ruang sosial yang memungkinkan Islamophobia tumbuh secara sistemik dan tidak terkendali (Singh 2024).

3.1.2 Prasangka Melalui Percakapan Sehari-Hari

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya (prasangka melalui media) dalam rentan periode 2019–2022, terutama selama pandemi COVID-19, percakapan sehari-hari di India menjadi salah satu media prasangka terhadap Muslim, yang diperkuat oleh narasi seperti #CoronaJihad dan #JihadCinta. Dalam interaksi sosial, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun media sosial, Muslim seringkali dicurigai sebagai penyebar virus atau dianggap memiliki agenda tersembunyi dalam pernikahan antar agama. Ungkapan-ungkapan seperti “mereka sengaja menyebarkan penyakit” atau “awas love jihad” menjadi bagian dari percakapan sehari-hari yang tidak hanya mencerminkan, tetapi juga memperkuat stereotip negatif. Penyebaran informasi

yang bias dalam obrolan santai, diskusi di tempat umum, hingga pesan berantai dalam beberapa berbagai media sosial menjadikan prasangka ini semakin mengakar, membentuk opini publik yang diskriminatif dan mempengaruhi hubungan sosial di tingkat individu maupun komunitas.

Berdasarkan laporan dari India Hate Lab tahun 2024, jumlah insiden kasus Islamophobia berupa ujaran kebencian yang menargetkan kaum minoritas agama melonjak dari 668 pada tahun 2023 hingga menjadi 1.165 pada tahun 2024. Hal ini menandai peningkatan yang mengejutkan sebesar 74,4%. Ujaran kebencian yang didefinisikan sebagai ujaran kekerasan yang dapat meningkatkan kekerasan terhadap kelompok lain juga mengalami peningkatan yang signifikan (India Hate Lab 2024).

Sebagian besar insiden ujaran kebencian terjadi di negara bagian yang diperintah oleh BJP atau sekutunya, dengan Uttar Pradesh (242 insiden), Maharashtra (210 insiden), dan Madhya Pradesh (98 insiden) menjadi tiga negara bagian dengan jumlah kasus tertinggi. BJP sendiri bertanggung jawab atas penyelenggaraan 340 insiden (29,2%), meningkat drastis sebesar 580% dibandingkan dengan tahun 2023, ketika partai ini hanya menyelenggarakan 50 acara ujaran kebencian. Sebanyak 685 insiden (58,8%) diselenggarakan oleh entitas yang merupakan bagian dari *Sangh Parivar*, termasuk Vishwa Hindu Parishad-Bajrang Dal, BJP, Sakal Hindu Samaj (SHS), dan Durga Vahini. Dalam hal aktor yang terlibat, sebanyak 462 insiden (39,7%) dilakukan oleh politisi, dengan pemimpin BJP bertanggung jawab atas 452 insiden. Peningkatan ini cukup signifikan dibandingkan tahun 2023, di mana hanya terdapat 100 insiden ujaran kebencian yang melibatkan politisi BJP, menunjukkan peningkatan

sebesar 352% (India Hate Lab 2024).

Di antara tokoh-tokoh utama penyebar ujaran kebencian, Yogi Adityanath menyampaikan 86 pidato (7,4%), Narendra Modi 63 pidato (5,7%), dan Amit Shah turut berkontribusi dalam sejumlah insiden. Selain itu, 114 insiden (9,8%) dilakukan oleh pengkhotbah Hindu, dengan Mahant Raju Das, Yati Narsinghanand Saraswati, dan Sadhvi Saraswati sebagai aktor utama. Secara tematis, sebanyak 581 insiden (49,9%) berhubungan dengan teori konspirasi sayap kanan, termasuk “jihad cinta,” “jihad tanah,” “jihad penduduk,” dan “jihad pemilih,” dengan peningkatan sebesar 38,3% dibandingkan tahun 2023 (India Hate Lab 2024).

Ujaran kebencian yang menyerang tempat ibadah juga mengalami peningkatan sebesar 62,1%, dengan 274 insiden (23,5%) menyerukan penyitaan, pemindahan, atau penghancuran tempat ibadah milik Muslim dan Kristen. Di antara insiden-insiden tersebut, 84 di antaranya disampaikan oleh politisi BJP. Selain itu, 123 insiden (10,6%) mencakup ajakan eksplisit untuk mengangkat senjata, meningkat 32,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Ujaran kebencian yang menyerukan boikot sosial atau ekonomi terhadap komunitas minoritas mencapai 111 insiden (9,5%), meningkat sebesar 27,6% dari tahun 2023 (India Hate Lab 2024).

Dalam konteks kelompok pengungsi, sebanyak 118 insiden (10,1%) menysasar komunitas Rohingya, sementara 182 insiden (15,6%) mempromosikan narasi tentang “penyusup Bangladesh.” Khususnya, ujaran kebencian terhadap pengungsi Rohingya meningkat secara drastis hingga 210% dibandingkan

dengan tahun 2023.

Berdasarkan temuan ini, laporan *Peristiwa Ujaran Kebencian di India 2024* menunjukkan bagaimana ujaran kebencian telah menjadi bagian dari strategi politik elektoral dan memperkuat nasionalisme Hindu dalam bentuk yang semakin ekstrim. Narasi yang menstigmatisasi Muslim dan Kristen sebagai ancaman eksistensial bagi umat Hindu terus diproduksi dan diperkuat, menyebabkan marginalisasi yang semakin sistematis terhadap kelompok minoritas. Melihat tren ini, ujaran kebencian tampaknya akan tetap menjadi bagian dari dinamika politik India di masa mendatang (India Hate Lab 2024).

Sementara itu adapun contoh kasus mengenai prasangka ditemukan dalam pelayanan kesehatan, pada tahun 2019 seorang wanita bernama Fatima menerima perawatan prenatal di rumah sakit tercemar oleh perlakuan merendahkan dari tenaga medis, yang didasarkan pada identitas religiusnya, khususnya penggunaan jilbab. Ia mengungkapkan bahwa seringkali dirinya mendengar komentar-komentar yang merendahkan terkait praktik budaya dan agamanya, yang menimbulkan ketidaknyamanan dalam menerima pelayanan kesehatan. Selain itu, kendala komunikasi semakin memperumit aksesnya terhadap informasi esensial mengenai kehamilannya. Ia menyatakan bahwa pengalaman penghinaan yang berulang dapat mendorong individu untuk menghindari layanan kesehatan, yang pada akhirnya berdampak pada tekanan emosional dan kesejahteraan psikologisnya. Kemudian hal serupa dialami oleh Amir pada sesi wawancara tahun 2020. Pengalaman yang dialami oleh Fatima dan Amir menyoroti permasalahan diskriminasi berbasis agama yang masih

marak terjadi, khususnya terhadap perempuan Muslim dalam sistem pelayanan kesehatan (Ali and Sarwar 2024).

Kasus prasangka dalam sehari-hari tidak hanya dirasakan oleh warga asli India saja tetapi juga dialami oleh para imigran yang menempati wilayah India dan berasal dari negara-negara tetangga di sekitar India. Seperti halnya ditemukan dalam studi “Experiences of Muslims in India on Digital Platforms with Anti-Muslim Hate: A Culture-Centered Exploration” oleh Dutta dan Pal (2024) menyoroti bagaimana imigran Muslim, khususnya dari negara-negara seperti Bangladesh dan Suku Rohingya dari Myanmar, menjadi target ujaran kebencian di ruang digital India. Mereka kerap dicap sebagai “penyusup” atau “ancaman demografis,” yang memperkuat stereotip negatif dan membenarkan perlakuan diskriminatif, baik secara daring maupun dalam kebijakan negara seperti Citizenship Amendment Act (CAA). Representasi digital ini menciptakan prasangka buruk publik terhadap para imigran Muslim dan juga mengancam integrasi kehidupan sosial (Duta and Pal 2024).

3.2 Aspek Diskriminasi dalam Fenomena Islamophobia di India

Diskriminasi terhadap umat Islam merupakan manifestasi nyata dari Islamophobia yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang ketenagakerjaan dan akses terhadap layanan publik. Diskriminasi ini dapat terjadi secara struktural maupun sosial, di mana kebijakan serta norma yang berlaku seringkali merugikan komunitas Muslim secara sistematis di India. Dalam dunia kerja, Muslim, khususnya perempuan yang mengenakan jilbab

kerap menghadapi kendala dalam proses perekrutan maupun di lingkungan kerja. Sementara itu, dalam sektor layanan publik, diskriminasi terlihat dalam ketimpangan akses terhadap pendidikan dan fasilitas umum, yang semakin memperdalam kesenjangan sosial bagi komunitas Muslim.

3.2.1 Diskriminasi dalam Praktik Dunia Pekerjaan

Pada tahun 2019-2020, masa pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya lapangan kerja bagi warga Muslim perkotaan dengan persentase sebagian besar 68,3%, hal menunjukkan bahwa diskriminasi yang dihadapi warga Muslim mengalami peningkatan sebesar sembilan persen selama 16 tahun terakhir. Pada mulanya tahun 2004-2005 sebesar 59,3%. Di daerah pedesaan, umat Islam mengalami peningkatan pengangguran paling tajam 17% pada kuartal pertama COVID-19. Pekerja yang berasal umat Islam muncul sebagai kelompok yang paling terdampak, yang persentasenya meningkat dari 11,8% menjadi 40,9% di daerah pedesaan, sedangkan peningkatan yang sesuai untuk Kasta Terjadwal (SC) dan Suku Terjadwal (ST) (5,6% menjadi 28,3%) dan kategori umum (5,4% menjadi 28,1%) memiliki persentase lebih kecil (*outlook 2022*).

Selain tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih rendah, Muslim juga menghadapi kesenjangan pendapatan yang mencolok. Rata-rata pekerja non-Muslim di daerah perkotaan dengan pekerjaan bergaji tetap memperoleh 20.346 rupee India (sekitar \$255), yang 49% lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja Muslim yang hanya mendapatkan 13.672 rupee India (sekitar \$171) (*Anadolu Agency 2022*).

Peningkatan pengangguran di kalangan minoritas di India tidak lepas dari dampak jangka panjang diberlakukannya Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) tahun 2019. Pengesahan Citizenship Amendment Act (CAA) tahun 2019 menunjukkan kecenderungan kebijakan eksklusif berbasis agama, yang secara eksplisit mengecualikan Muslim dari jalur percepatan kewarganegaraan. Kebijakan ini memperkuat marginalisasi sistemik terhadap Muslim India, terutama dalam aspek sosial-ekonomi. Pasca-CAA, terjadi peningkatan diskriminasi terhadap Muslim dalam pasar tenaga kerja. Data *Periodic Labour Force Survey (2022–2023)* mencatat hanya 15,6% Muslim perkotaan yang memiliki pekerjaan tetap, dibandingkan dengan 23,3% non-Muslim. Diskriminasi struktural ini mempersempit akses Muslim terhadap pekerjaan layak, sehingga mendorong peningkatan angka pengangguran di kalangan mereka. Dengan demikian, CAA tidak hanya menguntungkan non-Muslim dari negara tetangga, tetapi juga memperdalam kesenjangan ekonomi domestik melalui eksklusi Muslim dari berbagai sektor strategi (Human Rights Watch 2024).

Selama periode Juli 2023 hingga Juni 2024, angka pengangguran di kalangan kelompok minoritas di India mengalami kenaikan, meskipun secara keseluruhan tingkat pengangguran nasional tetap stabil untuk pertama kalinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari *Periodic Labour Force Survey (PLFS)*, pengangguran di kalangan umat Muslim meningkat dari 2,4% menjadi 3,2%, sedangkan pada komunitas Sikh naik dari 5,1% menjadi 5,8%. Sebaliknya, pengangguran di kalangan umat Hindu justru menunjukkan sedikit penurunan, yakni sebesar 0,1 poin persentase (Wani 2024).

Menurut data terbaru dari Survei Angkatan Kerja Berkala, pengangguran di kalangan Sikh naik dari 5,1 persen pada 2022–2023 menjadi 5,8 persen pada 2023–2024. Sementara itu, umat Muslim mengalami lonjakan pengangguran paling signifikan, dari 2,4 persen menjadi 3,2 persen dalam periode yang sama. Di sisi lain, pengangguran di kalangan umat Kristen mengalami kenaikan yang lebih ringan, sedangkan di kalangan umat Hindu justru tercatat sedikit menurun sebesar 0,1 persen. Secara positif, tingkat pengangguran pada tahun 2023-2024 menunjukkan penurunan di semua kelompok agama jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi, yaitu tahun 2019-2020. Sama seperti pada masa pra-Covid, umat Muslim kembali mencatat tingkat pengangguran terendah di antara seluruh komunitas agama pada tahun 2023-2024 (Wani 2024).

Dikutip melalui Al Jazeera tahun 2022 yang berjudul *Muslim Women in India Allege Bias in Hiring for Jobs*, diskriminasi terhadap perempuan Muslim dalam dunia kerja di India menjadi tantangan yang nyata. Lubna Aamir, seorang dokter gigi yang berusia 28 tahun dari Pune, menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun memiliki kualifikasi tinggi serta pengalaman magang di perguruan tinggi negeri bergengsi. Dalam salah satu wawancara di sebuah klinik gigi besar, ia diminta untuk melepas jilbabnya jika ingin diterima bekerja. Setelah menolak permintaan tersebut, seorang eksekutif HR menyampaikan bahwa mereka tidak akan melanjutkan proses rekrutmen untuknya. Akibat perlakuan diskriminatif tersebut, Aamir akhirnya beralih ke pekerjaan non-klinis sebagai analis data medis di sebuah perusahaan bioinformatika (Amin 2022).

Dalam sebuah studi yang berjudul *Minority Report: Unemployment Rate Among Religious Minorities Up in 2023-2024* yang ditulis oleh Wani Samreen

menyebutkan tingkat pengangguran di kalangan pengangguran dari umat Muslim pada rentang tahun 2023-2024 juga mengalami peningkatan dari 2,4% menjadi 3,2%. Sementara itu tidak ada satupun Muslim yang menjabat sebagai kepala menteri di 28 negara bagian India. Misalnya, di Uttar Pradesh yaitu negara bagian dengan populasi terbesar, di mana Muslim mencakup 16% dari total penduduk hanya 7% anggota parlemen negara bagian yang berasal dari kelompok ini (Wani and Dhasmana 2024).

Pada tahun 2023, dilansir melalui Hindustan Times yang berjudul *Apple India employee in Bengaluru quits: Islamophobia, mental harassment allegations, misconduct, HR inaction* bahwa terdapat seorang mantan karyawan Apple di Bengaluru, India, memilih untuk mengundurkan diri setelah perusahaan diduga tidak menangani keluhannya terkait perilaku tidak pantas, pelecehan mental, dan komentar bernada Islamophobia dari rekan kerjanya. Khalid Parvez, yang telah bekerja di Apple selama 11 tahun, mengungkapkan bahwa saat melaporkan insiden tersebut ke departemen Sumber Daya Manusia (SDM), respons yang diterima tidak memadai (Johny 2023).

Meskipun awalnya dijanjikan investigasi menyeluruh dan diminta untuk mempercayai sistem, setelah dua bulan, tim hubungan karyawan (ER) justru memberikan tanggapan yang dianggap kurang sensitif, termasuk penolakan, kurangnya empati, serta tuduhan balik. Parvez juga menyatakan bahwa ER meremehkan kondisi kesehatan mentalnya dan keluarganya dengan alasan mereka bukan tenaga medis serta menolak mengakui bahwa lingkungan kerja di Apple berkontribusi terhadap masalah tersebut. Merasa kesejahteraannya tidak

cukup dilindungi oleh perusahaan, ia akhirnya memutuskan untuk mundur demi kepentingan pribadi dan keluarganya (Johny 2023).

Dalam kasus yang lain, seorang pengemudi becak di Mumbai bernama Ashfaq Shaikh, menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan dengan pendapatan kurang dari USD 100 per bulan, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Shaikh meyakini bahwa kesulitan finansial yang ia alami bukan semata-mata akibat kondisi pasar tenaga kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh diskriminasi berbasis agama, banyak pemberi kerja cenderung mempertimbangkan faktor agama saat merekrut karyawan, sehingga mempersempit kesempatan bagi individu Muslim untuk memperoleh pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan layak (Baker 2024).

3.2.2 Diskriminasi dalam Penyedia Layanan

Umat Islam di India menghadapi diskriminasi sistemik yang berdampak signifikan terhadap akses mereka dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Abdul Malik Mujahid, presiden *Justice For All* berpendapat bahwa tantangan kesulitan yang dihadapi oleh umat Muslim adalah dalam hal pendidikan dan ekonomi. Sementara itu, berdasarkan laporan Anadolu Agency berjudul *Activist Decries Discrimination Muslims Face in India* pada tahun 2024, meskipun Muslim mencakup sekitar 15% dari populasi India, hanya 1% dari mereka yang bekerja di pemerintahan. Sebaliknya, umat Brahmana, yang hanya mewakili 3,5% dari populasi, mendominasi 61% pekerjaan di sektor pemerintahan tersebut (Ozkan 2024).

Di tingkat negara bagian, representasi Muslim juga tergolong rendah.

Dari lebih dari 4.000 anggota parlemen di badan legislatif negara bagian, hanya 6% yang berasal dari komunitas Muslim. *See For All*, menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi komunitas Muslim, terutama dalam memperoleh pendidikan yang setara serta pekerjaan yang layak. Meskipun banyak Muslim berhasil meraih prestasi akademik yang tinggi, mereka tetap mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Akibatnya, sebagian besar terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah rendah. Mujahid mencontohkan seorang pemuda Muslim di New Delhi yang memiliki gelar Magister, tetapi harus bekerja sebagai buruh karena kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya (Ozkan 2024).

Selanjutnya, menurut laporan yang diterbitkan oleh Oxfam (2021), secara eksplisit mengungkapkan bahwa umat Muslim mengalami tingkat diskriminasi yang lebih tinggi dalam pelayanan kesehatan, dengan 33% dari mereka menghadapi perlakuan diskriminatif di rumah sakit. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Kasta Terjadwal, yang mengalami diskriminasi sebesar 22%. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan perlakuan di sektor kesehatan yang didasarkan pada identitas agama dan sosial, yang berpotensi memperburuk ketidakadilan struktural dalam pelayanan kesehatan (Ali and Sarwar 2024).

Dalam sektor pendidikan, umat Islam menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang menghambat kemajuan akademik mereka. Sejak tahun 2019 dan tahun 2020, Kesenjangan pendidikan bagi siswa Muslim di India semakin memburuk, dengan laporan terbaru yang menunjukkan penurunan pendaftaran

mereka di semua jenjang pendidikan hingga mencapai 8%. Situasi ini diperparah oleh larangan kontroversial penggunaan jilbab di lembaga pendidikan Karnataka, negara bagian terbesar keenam di India, yang diterapkan pada tahun 2021. Kebijakan ini memicu perdebatan nasional mengenai diskriminasi terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan Muslim, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap akses pendidikan. Akibat larangan tersebut, sekitar 1.010 anak perempuan berhijab terpaksa putus sekolah dari perguruan tinggi pra-universitas di Karnataka, dengan waktu penerapannya yang bertepatan dengan ujian akhir tahun semakin memperburuk dampaknya (Abdulla 2023).

Selain itu, perubahan dalam kurikulum pendidikan di India juga semakin memperburuk marginalisasi umat Islam. Beberapa informasi mengenai kontribusi sejarah umat Islam dihapus dari buku pelajaran, termasuk peran arsitek Muslim dalam pembangunan Taj Mahal. Bahkan, beberapa materi pembelajaran justru mengandung narasi yang merendahkan umat Islam, seperti penggambaran negatif terhadap mereka yang mengkonsumsi daging sapi hingga ditutupnya 50.000 toko daging sapi akibat adanya larangan pengangkutan sapi untuk tujuan non pertanian yang mengakibatkan matinya industri daging dan kulit (Ozkan 2024).

Pada November 2022, pemerintah Modi menghentikan Skema Beasiswa Nasional Maulana Azad, yang sejak tahun 2009 telah memberikan dukungan keuangan bulanan bagi mahasiswa tingkat M.Phil. dan PhD. Skema ini merupakan satu-satunya program yang didanai pemerintah India untuk mendukung pendidikan tinggi, dan dinamai berdasarkan nama Menteri

Pendidikan pertama India pasca-kemerdekaan. Meskipun skema ini terbuka untuk semua kelompok agama minoritas, mayoritas penerimanya berasal dari komunitas Muslim (Sadaqat 2024).

Namun sayangnya penerima beasiswa ini tidak lagi menerima dana secara rutin sejak tahun 2019 dan tunjangan mereka tidak mengalami peningkatan seperti yang terjadi pada skema pendidikan lainnya. Kebijakan pemerintah yang dipimpin BJP ini semakin mempersempit akses masyarakat Muslim terhadap pendidikan tinggi, peluang penelitian, dan keterlibatan dalam dunia akademik. Sebelum penghapusan skema ini, pemerintah juga mencabut bantuan untuk siswa sekolah dasar dan menengah dengan menghapus beasiswa pra-matrik bagi siswa kelas I hingga VIII. Sekalipun sekolah swasta, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya hanya menerima sedikit dana, pencabutan total dana tersebut berdampak besar pada anak-anak dari komunitas terpinggirkan (Sadaqat 2024).

Fenomena Islamophobia yang terkait dengan larangan penggunaan jilbab di India berawal dari protes yang dilakukan oleh mahasiswa beragama Hindu di sebuah perguruan tinggi di Karnataka, India pada bulan Februari tahun 2022 lalu. Pada saat itu, Pejabat di Perguruan Tinggi Pemerintah Kundapur diduga menutup gerbang kampusnya bagi para mahasiswi yang menggunakan hijab. Larangan ini tidak hanya berlaku bagi mahasiswa Muslim India saja tetapi juga berlaku bagi mahasiswa Hindu yang menggunakan syal sebagai bentuk protes. Meskipun para mahasiswa memohon agar tetap diizinkan untuk masuk kelas, namun Perguruan Tinggi Kundapur tersebut tidak mengizinkannya. Hal tersebut

dilakukan setelah semua Perguruan Tinggi pemerintah diminta untuk mempertahankan 'status quo' mengenai aturan berpakaian oleh departemen pendidikan negara bagian (Shood 2022).

Selain itu, kontroversi nasional seputar larangan jilbab yang dipicu oleh putusan Pengadilan Tinggi Karnataka pada Maret 2022, memaksa siswi Muslim untuk memilih antara menegakkan ajaran agama mereka atau tetap melanjutkan pendidikan. Meskipun konflik tersebut bermula di Karnataka, diskriminasi terhadap siswa Muslim juga terjadi secara luas, termasuk di wilayah seperti Uttar Pradesh dan Delhi, di mana siswa menghadapi sikap kebencian di lingkungan sekolah mereka (Sadaqat 2024).

Sementara itu hal serupa mengenai keterbatasan akses pendidikan juga dialami oleh warga imigran yang berasal dari Rohingya. Terdapat lebih dari 22.000 pengungsi Rohingya tinggal di India dan sebagian besar dari mereka melarikan diri dari kekerasan militer di Myanmar pada tahun 2017. Meskipun India tidak menandatangani Konvensi Pengungsi PBB 1951 maupun Protokol 1967, komunitas Rohingya sempat hidup dengan relatif damai di berbagai kota besar seperti New Delhi dan Hyderabad. Namun, sejak pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berhaluan nasionalis Hindu berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2014, para pengungsi Rohingya menghadapi peningkatan tekanan. Mereka diposisikan sebagai imigran ilegal dan ancaman keamanan, yang berdampak pada pembatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal (Rahman 2024).

Seperti halnya yang dialami oleh Ahmed, salah satu warga Rohingya yang tinggal di India. Beliau memiliki harapan agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan formal di India setelah Ahmed dan keluarganya melarikan diri ke India pada tahun 2016 lalu. Namun amat disayangkan bahwa anak-anak dari Ahmed mengalami penolakan dari lima sekolah yang telah Ahmed daftarkan untuk anak-anaknya. Ahmed menyatakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh dokumen yang diminta, termasuk kartu UNHCR dan surat pernyataan, sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh pihak berwenang di lima sekolah untuk proses pendaftaran anak-anak pengungsi. Meski demikian, semua sekolah tersebut akhirnya menolak menerima anak-anaknya, dengan alasan bahwa mereka tidak dapat menerima siswa dari komunitas Rohingya. "Saya sangat khawatir terhadap masa depan anak-anak saya," ujarnya (Rahman 2024).

Kisah yang dialami keluarga Ahmed bukanlah satu-satunya. Di kawasan Khajuri Khas, yang menjadi tempat tinggal bagi sekitar 40 keluarga pengungsi Rohingya dalam kondisi serba terbatas di gubuk-gubuk darurat, setidaknya 18 anak dilaporkan telah ditolak masuk sekolah negeri dalam beberapa tahun terakhir akibat bentuk diskriminasi yang berlandaskan agama (Rahman 2024).

Oleh karena itu beberapa kasus diskriminasi yang terjadi di India, menuai tanggapan dari pemerintah. Adapun respons pemerintah India terhadap tuduhan diskriminasi berbasis agama selalu dibarengi dengan bantahan tegas dari para pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Narendra Modi. Dalam konferensi pers bersama Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Juni 2023, Modi menyatakan bahwa hak-hak minoritas tidak memerlukan perbaikan lebih lanjut, dan

pemerintah menegaskan bahwa kebijakan mereka bertujuan untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat tanpa bias agama. Namun demikian, aktivis HAM menegaskan bahwa pernyataan ini bertentangan dengan pendokumentasian menyeluruh oleh kelompok Hak Asasi Manusia dan laporan Departemen Luar Negeri AS, yang mencatat berbagai diskriminasi yang mengikis hak beragama dan kebebasan sipil. Pemerintah terus membantah tuduhan diskriminasi, namun kritik internasional dan dalam negeri menyebut sikap tersebut sebagai penyangkalan dan kebohongan terhadap realita yang terus memburuk (Singh 2023).

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

India merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu. Dengan lebih dari 200 juta Muslim, India menempati posisi ketiga sebagai negara dengan populasi Muslim terbanyak setelah Indonesia dan Pakistan berdasarkan Pew Research Center pada tahun 2021.

Sebagai salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, India menghadapi tantangan sosial yang kompleks dengan berbagai kasus yang muncul akibat sentimen kebencian terhadap Islam. Salah satu faktor utama yang memperburuk tantangan sosial tersebut adalah meningkatnya Islamophobia. Fenomena Islamophobia di India semakin memburuk sejak kemenangan BJP dalam pemilu 2019 dibawah kepemimpinan Narendra Modi. Terlebih lagi ketika terdapat kebijakan yang diusung, seperti Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act) atau yang disebut sebagai CAA pada tahun 2019 yang menimbulkan kecaman luas karena dianggap merugikan komunitas muslim.

Oleh karena itu, terdapat dampak yang ditimbulkan dari adanya Islamophobia di India yang bukan hanya terasa di lingkup pemerintahan saja tetapi juga terasa dalam aspek sosial dan ekonomi. Adapun dampaknya ialah Muslim di India menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, pendidikan, dan akses layanan publik yang membuat mereka kerap menghadapi kesulitan

mendapatkan pekerjaan di sektor formal akibat stereotip negatif di masyarakat.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Runnymede Trust mengenai empat aspek Islamophobia yang meliputi *Exclusion* (pengecualian), *Violence* (kekerasan), *Prejudice* (prasangka) dan *Discrimination* (diskriminasi) maka terdapat beberapa dampak Islamophobia yang terjadi di India berdasarkan keempat aspek tersebut.

Dilihat dari aspek yang pertama yaitu *Exclusion* (pengecualian), dalam aspek pengecualian menimbulkan banyak kasus pengecualian yang terjadi baik dalam lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan pemerintahan dan politik. Sejak tahun 2019-2020 menunjukkan ketimpangan signifikan dalam akses terhadap pekerjaan dengan gaji tetap antara kelompok Muslim dan non-Muslim di wilayah perkotaan. Hanya 15,6% dari Muslim berusia 15 tahun ke atas yang memiliki pekerjaan tetap dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan 23,3% dari populasi non-Muslim. Sehingga ketimpangan tersebut mencerminkan adanya hambatan struktural yang menghambat Muslim dalam memperoleh pekerjaan formal yang lebih stabil.

Bukan hanya dari segi pengecualian saja, tetapi dampak Islamophobia dapat dilihat dari aspek *violence* (kekerasan). Dalam aspek kekerasan, pada bulan Februari 2020, terjadi kerusuhan komunal setelah disahkannya CAA di wilayah timur laut New Delhi, India yang menewaskan sedikitnya 53 orang dan melukai lebih dari ratusan lainnya. Insiden ini berawal dari ketegangan yang dipicu oleh pro dan kontra terhadap Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Act) atau CAA yang dianggap diskriminatif terhadap

umat Muslim. Bentrokan antara kelompok yang mendukung dan menentang kebijakan tersebut berkembang menjadi aksi kekerasan.

Sementara itu ditinjau dari aspek yang ketiga yaitu *prejudice* (prasangka), ternyata prasangka juga termasuk dalam dampak Islamophobia. Prasangka yang berkembang di lingkungan masyarakat India terbagi dalam dua bentuk yaitu prasangka melalui percakapan sehari-hari dan prasangka melalui media. Prasangka melalui percakapan sehari-hari seringkali terjadi di lingkungan pendidikan maupun pekerjaan. Namun perlu diketahui bahwa berdasarkan laporan dari India Hate Lab tahun 2024, jumlah insiden kasus Islamophobia berupa ujaran kebencian yang menargetkan kaum minoritas agama melonjak dari 668 pada tahun 2023 hingga menjadi 1.165 pada tahun 2024. Hal ini menandai peningkatan yang mengejutkan sebesar 74,4%. Ujaran kebencian yang didefinisikan sebagai ujaran kekerasan yang dapat meningkatkan kekerasan terhadap kelompok lain juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Adapun aspek yang terakhir yaitu *discrimination* (diskriminasi). Diskriminasi yang terjadi sebagai bentuk dampak Islamophobia dapat terbagi menjadi dua, yakni diskriminasi dalam praktik dunia pekerjaan dan diskriminasi dalam penyedia layanan. Diskriminasi dalam praktek dunia kerja dapat berupa adanya peningkatan pengangguran di kalangan minoritas di India yang tidak lepas dari dampak jangka panjang diberlakukannya Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) tahun 2019. Kebijakan ini memberikan perlindungan hanya kepada pengungsi non-Muslim dari negara tertentu, sehingga dianggap mendiskriminasi umat Muslim dan memperkuat polarisasi identitas di masyarakat.

Sementara itu ditinjau dari aspek diskriminasi dalam penyedia layanan, menurut laporan yang diterbitkan oleh Oxfam (2021), secara eksplisit mengungkapkan bahwa umat Muslim mengalami tingkat diskriminasi yang lebih tinggi dalam pelayanan kesehatan, dengan 33% dari mereka menghadapi perlakuan diskriminatif di rumah sakit. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Kasta Terjadwal, yang mengalami diskriminasi sebesar 22%. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan perlakuan di sektor kesehatan yang didasarkan pada identitas agama dan sosial.

Secara keseluruhan, fenomena Islamophobia di India menunjukkan bahwa kebijakan negara, retorika politik, dan peran media berkontribusi pada normalisasi diskriminasi dan marginalisasi terhadap komunitas Muslim. Keempat aspek yang diteliti mengindikasikan bahwa Islamophobia di India bukanlah fenomena yang bersifat spontan atau terpisah, melainkan merupakan bagian dari proses yang terstruktur dan terencana, yang mengancam stabilitas sosial, prinsip pluralisme, serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk menanggulangi Islamophobia melalui penguatan perlindungan hukum, pendidikan multikultural, pengawasan terhadap kebijakan publik, serta peningkatan literasi media masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi kebencian yang merugikan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis merekomendasikan agar pemerintah India secara serius mengevaluasi dan merevisi kebijakan publik yang berpotensi diskriminatif terhadap komunitas Muslim, khususnya kebijakan seperti Citizenship Amendment Act (CAA) yang telah menimbulkan dampak sosial dan

politik yang signifikan. Prinsip sekularisme yang dijamin dalam Konstitusi India perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan inklusif yang menjamin kesetaraan hak tanpa memandang latar belakang agama. Selain itu, peran aktif komunitas internasional, organisasi hak asasi manusia, dan lembaga multilateral sangat penting dalam melakukan pemantauan, advokasi, dan tekanan diplomatik guna mendorong perlindungan terhadap minoritas agama di India.

Media massa dan platform digital juga diharapkan dapat menghindari penyebaran narasi negatif serta aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Akademisi perlu melanjutkan studi tentang Islamophobia dengan pendekatan multidisipliner untuk memperkuat pemahaman dan menghasilkan strategi penanggulangan yang efektif. Di tingkat masyarakat, penting untuk membangun budaya toleransi melalui pendidikan, dialog lintas agama, serta penguatan peran masyarakat sipil dalam mendorong integrasi sosial. Sinergi antara negara, masyarakat, dan komunitas global sangat diperlukan untuk menciptakan tatanan sosial yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Abdulla, Shaheen. 2023. "One year on, Muslim girls in Karnataka grapple with hijab ban, anxious about future." *Maktoobmedia.com*, February 10, 2023. https://maktoobmedia.com/features/one-year-on-muslim-girls-in-karnataka-grapple-with-hijab-ban-anxious-about-future/#google_vignette.
- Adil, Ahmad. 2024. "India implements controversial Citizenship Amendment Act." *Asia Pacific*, March 12, 2024. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/india-implements-controversial-citizenship-amendment-act/3161854>.
- Agence France-Presse. 2024. "Muslim face dwindling Representation in Modi's India." *France 24*, April 8, 2024. <https://www.france24.com/en/live-news/20240408-muslims-face-dwindling-representation-in-modi-s-india>.
- Alaa, Fathimath, Kennimrod Sariburaja, and Arvin Tajari. 2022. "India's Citizenship Amendment Act (CAA) Of 2019: A Case Study of Anti-Muslim Sentiment in India." *International Journal of Interdisciplinary and Strategic Studies* 3, no. 5 (October): 268-282. <https://doi.org/10.47548/ijistra.2022.51>.
- Ali, Arbab, and Nadeem Sarwar. 2024. "Minority Exclusion!: Are Indian Muslim Facing Voter Supression?" *Aljazeera*, June 1, 2024. <https://www.aljazeera.com/features/2024/6/1/india-election-fairness-concerns-amid-muslim-vote-suppression-allegations>.
- Ali, Istikhar. 2024. "Discrimination in Healthcare: Exploring the Impact of Institutional Communalism on Muslims in India." *Engage*, October 19,

2024.

<https://www.epw.in/engage/article/discrimination-healthcare-exploring-impact>.

Amin, Zubair. 2022. "Muslim Women In India Allege Bias in hiring for job." *Aljazeera*, August 3, 2022.

<https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/muslim-women-in-india-allege-bias-in-hiring-for-jobs>.

Anadolu Agency. 2022. "Job Discrimination against Indian Muslims rises by 9% in 16 years." *Asia Pacific*, September 16, 2022.

<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/job-discrimination-against-indian-muslims-rises-by-9-in-16-years-report/2686269>.

Asian News International. 2021. "Central govt has the power to deport illegal foreign nationals: MHA." *Hindustan Times*, February 3, 2021.

<https://www.hindustantimes.com/india-news/central-govt-has-the-power-to-deport-illegal-foreign-nationals-mha-101612340314947.html>.

Aziz, Abdul. 2016. "Menangkal Islamofobia Melalui Reinterpretasi Al-Qur'an." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 65-82.

Bagri, Neha T. 2021. "India's Anti-Immigrant Crackdown Has Torn Apart Families and Locked Up Hundreds. 1.9 Million People Fear They Could Be Next." *Time.com*, September 5, 2021.

<https://time.com/6092299/india-anti-immigrant-crackdown-assam/>.

Bajoria, Jayshree. 2020. "India's Police Found Complicit in Anti-Muslim Mob Violence." *Human Rights Watch*, July 17, 2020.

<https://www.hrw.org/news/2020/07/17/indias-police-found-complicit-anti->

muslim-mob-violence?utm_.

Baker, Jalelah A. 2024. "India faces rising social inequality across religious lines."

Channel New Asia, June 25, 2024.

<https://www.channelnewsasia.com/asia/india-muslims-education-employment-economy-4435041>.

Banerjee, Biswajeet, Sheikh Saaliq, and Krutika Pathi. 2024. "Modi opens Hindu

temple built on ruins on razed mosque, in political triumph for prime minister." *Associated Press News India*, January 22, 2024.

<https://apnews.com/article/india-modi-temple-hindu-muslims-ayodhya-election-12102e8dd13a677b15d8760b4252aa7a>.

Bhatt, Saskhi. 2022. "Muslim Women Face Hiring Bias at Entry Level Jobs:

Study." *HR World*, June 30, 2022.

<https://hr.economictimes.indiatimes.com/news/workplace-4-0/diversity-and-inclusion/muslim-women-face-hiring-bias-at-entry-level-jobs-study/92558868>.

CNN Indonesia. 2024. "Pernyataan Lengkap Perdana Menteri India Narendra

Modi Dicap Singgung Umat Islam." *CNN Indonesia*, April 26, 2024.

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240426131707-113-1090831/pernyataan-lengkap-pm-india-narendra-modi-dicap-singgung-umat-islam>.

Duta, Mohan J., and Mahuya Pal. 2024. "Experiences of Muslims in India on

digital platforms with anti-Muslim hate: a culture-centered exploration."

Journal Frontiers in Communication 9 (September).

<https://doi.org/10.3389/fcomm.2024.1205116>.

- The Hindu Bureau. 2022. "SP leader Azam Khan disqualified from U.P. Assembly after conviction in hate speech case." *The Hindu*, October 28, 2022. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/sp-leader-azam-khan-disqualified-from-up-assembly-after-conviction-in-hate-speech-case/article66066804.ece?utm_
- Hindustan Times. 2025. "'Muslim leaders are constantly lying': BJP MP on Waqf Bill." *Hindustan Times*, May 29, 2025. <https://www.hindustantimes.com/india-news/muslim-leaders-are-constantly-lying-bjp-mp-on-waqf-amendment-bill-101743268263013.html>.
- Human Rights Watch. 2024. "'Shoot the Traitors' Discrimination Against Muslims under India's New Citizenship Policy." *Human Rights Watch*, April 10, 2024. <https://www.hrw.org/report/2020/04/10/shoot-traitors/discrimination-against-muslims-under-indias-new-citizenship-policy>.
- India Hate Lab. 2024. "Report 2023: Hate Speech Events in India." *India Hate Lab*, February 25, 2024. <https://indiahatelab.com/2024/02/25/hate-speech-events-in-india-2023-annual-report/>.
- India Hate Lab. 2025. "Report 2024: Hate Speech Events in India." February 10, 2025. <https://indiahatelab.com/2025/02/10/hate-speech-events-in-india-2024/>.
- Jaber, Nihaya. 2022. "Islamophobia: Definition, History, and Aspects." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 5 (2): 327-38. <https://doi.org/10.31538/nzh.v5i2.1991>.

- Jaffrelot, Christophe. 2021. "Modi's India, Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy." In *Modi's India, Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy*, 188-192. Vol. VIII. N.p.: Princeton University Press. https://thesvi.org/wp-content/uploads/2023/01/modis-india-hindu-nationalism-and-the-rise-of-ethnic-democracy-188-192.pdf?utm_.
- Jaffrelot, Christophe, and Vihang Jumble. 2020. "A study of 1,779 Republic TV debates reveals how the channel champions Narendra Modi." *The Caravan*, December 15, 2020. https://caravanmagazine.in/media/republic-debates-study-shows-channel-promotes-modi-ndtv?utm_.
- Jayasekera, Deepal. 2020. "India: Mass protests against Modi's anti-Muslim Citizenship Amendment Act continue." *World Socialist Web Site*, January 24, 2020. https://www.wsws.org/en/articles/2020/01/24/aca-j24.html?utm_.
- Johny, Ritu M. 2023. "Apple Employee in Bengaluru Alleges Islamophobia Harassment: quits after HR inaction." *Hindustan Times*, June 16, 2023. <https://www.hindustantimes.com/technology/apple-india-employee-in-bengaluru-quits-islamophobia-mental-harassment-allegations-misconduct-hr-inaction-101686847975862.html>.
- Kumar, Abhay. 2024. "'Orientalism Internal' Media India." *Sabrang India*, January 31, 2024. https://sabrangindia.in/the-internal-orientalism-of-indian-media/?utm_.
- Kumar, N. 2020. "The Citizenship Amendment Act 2019 (CAA) And National Register Of Citizens (NCR): The Cuteness Law In India." *Journal of*

Critical Reviews 7 (19): 3866–3875.

Legislative Department. 2019. “The Gazette of India.” (Part II-Section 1 edition), 2019.

Lestari, Atmani A., M. S. Zahidi, and Mohd A. Aufiya. 2023. “Polarisasi Penguatan Nasionalisme Hindu di India Dalam Kebijakan Citizenship Amendment Act (CAA) 2019.” *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 1 (Februari): 134-147. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2963>.

Maktoob. 2023. ““Azam Khan, Abdullah Azam, Mohd Faizal...” Imtiaz Jaleel MP points out discrimination against Muslim MPs in disqualification cases.” *Maktoobmedia.com*, March 26, 2023. https://maktoobmedia.com/india/azam-khan-abdullah-azam-mohd-faizal-imtiaz-jaleel-mp-points-out-discrimination-against-muslim-mps-in-disqualification-cases/?utm_.

Maqbool, Rafiq. 2022. “5 Kasus Anti-Islam di India, Hina Nabi Muhammad sampai Larang Hijab.” *CNN Indonesia*, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220607152735-113-805919/5-kasus-anti-islam-di-india-hina-nabi-muhammad-sampai-larang-hijab>.

Mustaqim, Andika H. 2023. “Biadab, Ratusan Rumah dan Toko Warga Muslim di India Dihancurkan.” *Sindo News*, Agustus 8, 2023. https://international.sindonews.com/read/1170819/40/biadab-ratusan-rumah-dan-toko-warga-muslim-di-india-dihancurkan-1691478533?utm_.

Narula, S. 2003. “Overlooked danger: The security and rights implications of Hindu nationalism in India.” *Harvard Human Rights Journal*, no. 16,

41-69.

<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/hhrj16&id=47&collection=journals&index=>.

OIC. 2020. "OIC-IPHRC firmly rejects the illegal action of the Government of India to change the demographic status of Indian Occupied Jammu and Kashmir (IoJ&K) as it violates the OIC and UN Security Council Resolutions as well as international human rights." *Organisation of Islamic Cooperation*, May 7, 2020.

Ozkan, Sule. 2024. "Activist Decries Discrimination Muslim Face in India." *Asian Pacific*, January 10, 2024.
<https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/activist-decries-discrimination-muslims-face-in-india/3103420>.

Petersen, Hannah E., and Aakash Hassan. 2024. "Muslims in India face discrimination after restaurants forced to display workers' names." *The Guardian*, October 13, 2024.
https://www.theguardian.com/world/2024/oct/13/muslims-in-india-face-discrimination-after-restaurants-forced-to-display-workers-names?utm_.

Pew Research Center. 2021. "Population growth and religious composition." *Pew Research Center*, September 21, 2021.
https://www.pewresearch.org/religion/2021/09/21/population-growth-and-religious-composition/?utm_.

Poddar, M. 2018. "The Citizenship (Amendment) Bill, 2016: international law on religion-based discrimination and naturalisation law." *Indian Law Review*.
<https://doi.org/10.1080/24730580.2018.1512290>.

- Press Trust of India. 2022. "SCs, STs And Muslims Make Less Money In India Than Others: Oxfam Report On Job Biases." *outlook*, September 15, 2022. https://www.outlookindia.com/national/scs-sts-and-muslims-make-less-money-in-india-than-others-oxfam-report-on-job-biases-news-223449?utm_.
- Prevent Watch. 2022. "Middle East Eye: Most Twitter anti-Muslim hate comes from India." *Prevent Watch*, September 19, 2022. <https://www.preventwatch.org/twitter-anti-muslim-hate-india/#:~:text=The%20report%20revealed%20that%20over,and%20the%20UK%2C%20with%20196%2C376>.
- Rahman, Shaikh A. 2024. "Education is survival': parents of Rohingya refugee children fight for their right to go to school in India." *The Guardian.com*, November 26, 2024. https://www.theguardian.com/global-development/2024/nov/26/education-rohingya-refugee-children-india-schools?utm_.
- Rajvanshi, Astha. 2024. "How Modi's Supporters Used Social Media to Spread Disinformation During the Elections." *Time.com*, June 3, 2024. https://time.com/6984947/india-election-disinformation-modi/?utm_.
- Ramachandran, S. 2020. "Hinduvta Violence in India: Counter Terrorist Trends and Analyses." *JSTOR* 12 (4): 15-20. https://www.jstor.org/stable/26918077?seq=1#metadata_info_tab_contents.
- Republic TV. 2020. "Naqvi slams Tablighi members, says they spread COVID-19 and now claiming to be 'corona warriors.'" *Republic TV*, April 27, 2020. <https://www.republicworld.com/india/politics/naqvi-slams-tablighi-membe>

rs-says-they-spread-covid-19-and-now-claiming-to-be-corona-warriors.

Republic TV. 2024. "Life Imprisonment For Love Jihad: Key Points of The Anti-Conversion Bill Passed by UP Assembly." *Republic TV*, Juli 30, 2024.

<https://www.republicworld.com/india/bill-on-love-jihad-proposing-life-imprisonment-for-convicts-passed-in-up-assembly>.

Republic TV. 2024. "'Love Jihad' Waged By Certain Community, Hindu Girls Being Lured Into Love For Conversion: UP Court." *Republic TV*, October 2, 2024.

<https://www.republicworld.com/india/love-jihad-waged-by-certain-community-hindu-girls-being-lured-into-love-for-conversion-up-court>.

Republika. 2022. "4 Kasus Islamophobia di India: Dari Hina Nabi Muhammad, Hancurkan Masjid, Sampai Pelarangan Jilbab." *Republika*, June 10, 2022.
<https://kurusetra.republika.co.id/posts/153221/4-kasus-islamophobia-di-india-dari-hina-nabi-muhammad-hancurkan-masjid-sampai-pelarangan-jilbab-pg2>.

Republika. 2022. "Siapa Nupur Sharma, Politikus India Si Penghina Nabi Muhammad?" *Republika Khazanah*, June 10, 2022.
https://khazanah.republika.co.id/berita/rd9dy2366/siapa-nupur-sharma-politikus-india-si-penghina-nabi-muhammad-part1?utm_.

Riaz Abbasi, Muhammad U. 2022. "Islamophobia, Hatred and Violence against Muslim Communities in the West and Real Picture of Islam." *Journal Muslim of Minority Affairs*, (August). 10.

The Runnymede Trust. 1997. *Islamophobia A Challenge For Us All*. England:

The Runnymede Trust.

Saaliq, Sheikh. 2024. "India's new citizenship law excludes Muslims. Here's what to know." *Associated Press News India*, March 15, 2024. <https://apnews.com/article/india-citizenship-law-modi-muslims-caa-28909f8df0e6d5e0915e065195abef14>.

Saaliq, Sheikh, and Krutika Pathi. 2023. "India's Parliament has fewer Muslims as strength of Modi's Party grows." *World News*, March 28, 2023. <https://apnews.com/article/india-general-elections-muslims-modi-c01281195f71a4c8b4bd53146695a0e5>.

Sadaqat, Sumna. 2024. "A decade of educational challenges for Muslims in India." *Muslim Mirror Journalism of Truth*, February 2, 2024. https://muslimmirror.com/a-decade-of-educational-challenges-for-muslims-in-india/?utm_.

Shaikh, Ayesha, Gulraiz Iqbal, Janeeta Fazal, and Amna Khan. 2023. "Hindutva led Communal Repression by BJP: Mobilized Muslim Minority in India." *Journal of Research in Social Sciences* 11 (02): 77-103.

Shood, Anusha R. 2022. "2nd Karnataka college shuts gates on students over hijab, protests spread to more institutions." *The Print*, February 03, 2022. https://theprint.in/india/2nd-karnataka-college-shuts-gates-on-students-over-hijab-protests-spread-to-more-institutions/820542/?utm_.

Singh, Kanishka. 2023. "Modi's denial of discrimination against minorities in India is a lie, activists say." *Reuters.com*, June 24, 2023. <https://www.reuters.com/world/india/modis-denial-discrimination-against-minorities-india-is-lie-activists-say-2023-06-23/>.

- Singh, Kanishka. 2024. "Anti-Muslim hate speech soars in India, research group says." *Reuters.com*, February 26, 2024. <https://www.reuters.com/world/india/anti-muslim-hate-speech-soars-india-research-group-says-2024-02-26/>.
- South Asia Justice Campaign. 2024. "India's Persecuted Minorities: Legal, Political and Social Disenfranchisement of Muslims in Assam." *South Asia Justice Campaign*, August 31, 2024. https://southasiajusticecampaign.org/ipt2024-4/?utm_.
- twocircles.net. 2024. "Lowest Muslim Representation in Six Decades: Only 4.4% of MPs in 18th Lok Sabha are Muslim Despite Community Making Up 15% of Country's Population." *Twocircles.net*, June 20, 2024. https://twocircles.net/2024jun20/450022.html?utm_.
- United States Commission on International Religious Freedom. 2023. "2023 Annual Report." April, 2023. <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2023-05/2023%20Annual%20Report.pdf>.
- Wani, Samreen. 2024. "Minority report: Unemployment rate among religious minorities up in 2023-24." *Business Standard*, October 12, 2024. https://www.business-standard.com/economy/news/minority-report-unemployment-rate-among-religious-minorities-up-in-2023-24-124101200009_1.html.
- Wani, Samreen, and Indivjal Dhasmana. 2024. "Laporan minoritas: Tingkat pengangguran di kalangan minoritas agama meningkat pada tahun 2023-24." *Business Standard.com*, October 12, 2024.

https://www.business-standard.com/economy/news/minority-report-unemployment-rate-among-religious-minorities-up-in-2023-24-124101200009_1.html.

Zee News. 2020. "The biggest testimony over 'love jihad', See how family breaks." *Zee News*, October 30, 2020. <https://zeenews.india.com/video/india/the-biggest-testimony-over-love-jihad-see-how-family-breaks-2321239.html>.